

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat dan dikurangi Kabupaten Pangandaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

Wilayah Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 memiliki luas sebesar 2.444,79 Km<sup>2</sup> atau 244.479,43 Ha, sedangkan pada tahun 2013 menjadi seluas 1.433,10 Km<sup>2</sup> sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2013. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tersebut maka rincian wilayah beserta luas wilayah Kabupaten Ciamis yang baru menurut kecamatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Banjarsari	163,07	6,67	KABUPATEN CIAMIS 1.433,10 Km <sup>2</sup>
2	Lakbok	55,53	2,27	
3	Pamarican	104,21	4,26	
4	Cidolog	59,02	2,41	
5	Cimaragas	27,09	1,11	
6	Cijeungjing	58,25	2,38	
7	Cisaga	60,40	2,47	
8	Tambaksari	64,31	2,63	
9	Rancah	73,03	2,99	
10	Rajadesa	58,14	2,38	
11	Sukadana	58,22	2,38	
12	Ciamis	29,51	1,21	

NO	KECAMATAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )	PERSENTASE	KETERANGAN	
13	Cikoneng	34,11	1,40		
14	Cihaurbeuti	36,16	1,48		
15	Sadananya	43,50	1,78		
16	Cipaku	65,69	2,69		
17	Jatinagara	35,38	1,45		
18	Panawangan	80,91	3,31		
19	Kawali	34,99	1,43		
20	Panjalu	81,25	3,32		
21	Panumbangan	59,46	2,43		
22	Sindangkasih	30,43	1,24		
23	Baregbeg	20,11	0,82		
24	Lumbung	23,16	0,95		
25	Purwadadi	43,37	1,77		
26	Sukamantri	33,80	1,38		
27	Cimerak	118,18	4,83		KABUPATEN PANGANDARAN 1.011,69 Km <sup>2</sup>
28	Cijulang	93,16	3,81		
29	Cigugur	97,29	3,98		
30	Langkaplancar	177,19	7,26		
31	Parigi	98,04	4,01		
32	Sidamulih	77,98	3,19		
33	Pangandaran	60,77	2,49		
34	Kalipucang	136,78	5,59		
35	Padaherang	89,27	3,65		
36	Mangunjaya	63,03	2,58		
	JUMLAH	2.444,79			

Secara administrasi pemerintahan, pada tahun 2013 Kabupaten Ciamis terdiri dari 26 Kecamatan, 258 Desa dan 7 Kelurahan, dengan rincian perkembangan sebagaimana tabel berikut :

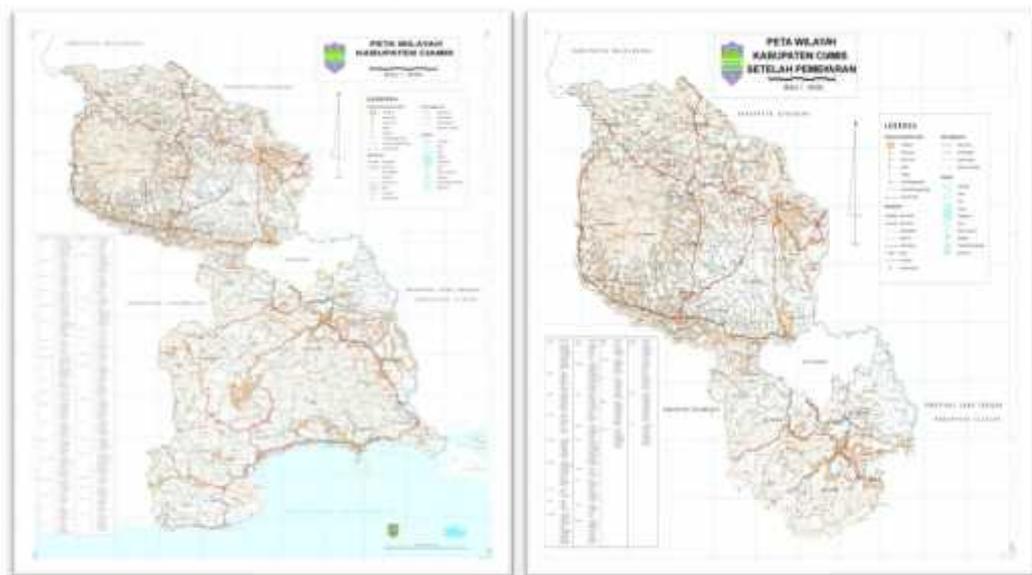
Tabel 2.2  
Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

TAHUN	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	RW	RT
2009	36	343	7	3.772	12.086
2010	36	346	7	3.772	12.089
2011	36	346	7	3.807	12.241
2012	36	351	7	3.851	12.252
2013	26	258	7	2.896	9.104

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa jumlah desa, RW dan RT mengalami perubahan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013, dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran maka wilayah administrasi Kabupaten Ciamis menjadi 26 kecamatan, 258 desa, 7 kelurahan, 2.896 RW, dan 9.104 RT.

Jumlah desa pada tahun 2009 sebanyak 343 desa bertambah menjadi 351 desa pada tahun 2012 dengan rincian pada tahun 2010 bertambah sebanyak 3 desa dan pada tahun 2012 bertambah sebanyak 5 desa. Sedangkan selama kurun waktu 2009-2012, jumlah Rukun Warga bertambah sebanyak 79 RW dan jumlah Rukun Tetangga bertambah sebanyak 166 RT.

Gambar 2.1  
Peta Administratif Kabupaten Ciamis sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Pangandaran



Berdasarkan letak administratif, Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran

#### 2.1.1.2. Letak Geografis

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, letaknya berada di ujung Timur Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat  $108^{\circ} 20'$  sampai dengan  $108^{\circ} 40'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 40' 20''$  sampai dengan  $7^{\circ} 41' 20''$  Lintang Selatan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah.

#### 2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara  $0 - > 40\%$  dengan sebaran  $0 - 2\%$  terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan  $2 - > 40\%$  tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian Utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 19 %, Bagian Tengah kearah Barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 m dpl sekitar 49%, sedangkan Bagian Tengah kearah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 m dpl sekitar 14%.

#### 2.1.1.4. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Ciamis di dominasi oleh jenis Latosol, Podzolik, Aluvial, kompleks Resina dan Grumusol. Kecamatan Panawangan, Kawali, Lumbung, Cipaku, Panjalu, Ciamis, Sadananya, Baregbeg, Panumbangan, Cihaurbeuti, Cikoneng, Sindangkasih, Cijeungjing, Rajadesa, Jatinagara, Rancah, dan Tambaksari memiliki jenis tanah Latosol; Kecamatan Cimaragas (bagian Selatan) memiliki jenis tanah Podzolik; Kecamatan Lakbok, dan Purwadadi memiliki jenis tanah Aluvial; Kecamatan Cisaga memiliki jenis tanah Komplek Resina, Kecamatan Banjarsari, Pamarican memiliki jenis tanah Grumusol.

#### 2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Di bagian selatan mengalir Sungai Cimedang dengan anak-anak sungainya terdiri dari sungai Cikondang, Cibegal, Cipaedang, Cibungur, Citatah I, Citatah II, Cigugur, Ciharuman, Cigembor, Cikuya, Cijengkol, Cimagung dan Cicondong.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy dengan luas 173.529,51 Ha, sedangkan sisanya termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Cimedang dengan luas 70.949,92 Ha. Wilayah Kabupaten Ciamis yang termasuk Daerah Aliran Sungai Citanduy, terbagi kedalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas 18.665,99 Ha.

Daerah Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai kritis dengan indikator kekritisannya antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi ( $\pm$  5 juta ton/tahun terbawa oleh sungai Citanduy), serta produktivitas Daerah Aliran Sungai yang relatif rendah.

#### 2.1.1.6. Klimatologi

Pembagian tipe iklim menurut Scmidt Fergusson berdasarkan pengamatan curah hujan selama 10 tahun terakhir, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Ciamis umumnya beriklim tipe C (agak basah), meliputi Kecamatan Cipaku, Padaherang, Mangunjaya, Banjarsari, Cihaurbeuti, Cimaragas, Tambaksari, Sadananya, Sukadana,



Jatinagara, Ciamis, dan Boregbeg. Beberapa wilayah memiliki tipe iklim B (basah), meliputi Kecamatan Kawali, Lumbung, Panawangan, Rancah, Panumbangan, Panjalu, Sukamantri, Cimerak, Cisaga, tipe iklim D (sedang), meliputi Kecamatan Cijeungjing, Pamarican, Cikoneng dan Sindangkasih; dan tipe iklim E (agak kering) meliputi Kecamatan Lakbok, Purwadadi, Cidolog dan Rajadesa. Keadaan suhu udara berkisar antara 20<sup>0</sup> C sampai dengan 30<sup>0</sup> C dengan rata-rata curah hujan sebesar 3.606,50 mm/tahun, dengan hari hujan 177,40 hari.

#### 2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 terdiri dari 192.575,82 Ha lahan kering dan 51.903,62 Ha lahan basah, dengan rincian penggunaan lahan seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

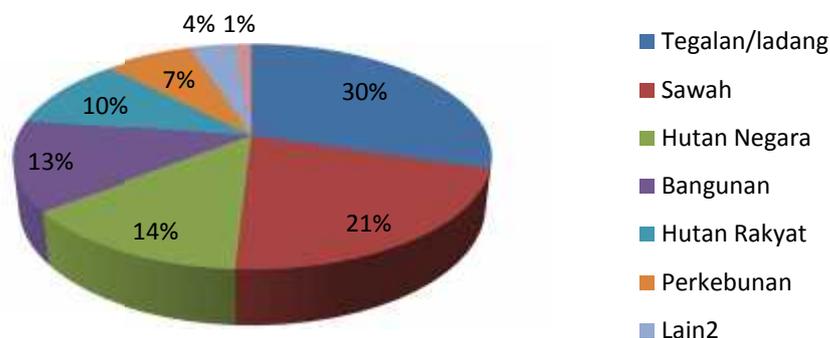
Tabel 2.3  
Penggunaan Lahan Kabupaten Ciamis Tahun 2012

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
<b>Lahan Kering</b>	<b>192.575,82</b>	<b>78,77</b>
Pekarangan /Tanah Untuk Bangunan & Halaman Sekitarnya	31.766,11	12,99
Tegal/Kebun/ Ladang/ Huma	70.205,57	28,72
Pengembalaan Padang Rumput	2.242,10	0,92
Sementara Tidak Diusahakan	72,00	0,03
Hutan Rakyat	25.257,16	10,33
Hutan Negara	33.116,91	13,55
Perkebunan Negara/Swasta	17.668,58	7,23
Rawa Yang Ditanami	133,00	0,05
Tambak	44,00	0,02
Kolam/ Tebet/ Empang	2.968,34	1,21
Lain-Lain (Jalan Gorong-Gorong Kuburan dsb)	9.102,05	3,72
<b>Lahan Sawah</b>	<b>51.903,62</b>	<b>21,23</b>
Irigasi Teknis	16.642,75	6,81
Irigasi 1/2 Teknis	4.244,74	1,74
Irigasi Sederhana/Desa	15.946,08	6,52
Tadah Hujan	14.458,15	5,91
Lebak	611,90	0,25
<b>Luas Lahan</b>	<b>244.479,44</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Ciamis Dalam Angka Tahun 2013, BPS Kabupaten Ciamis

Grafik 2.1

Penggunaan Lahan Kab. Ciamis Tahun 2012



### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, adalah:

#### 1. Kawasan peruntukan hutan produksi :

- (1) Hutan produksi terbatas, dengan lokasi di Kecamatan Cidolog, Panumbangan, Sadananya, Cihaurbeuti, Sukamantri, Panawangan, Pamarican.
- (2) Hutan produksi tetap, dengan lokasi Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Pamarican, Cisaga, Rancah, Tambaksari, Sadananya, Cipaku, Cikoneng, Sindangkasih, Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan, Sukamantri dan Rancah.

#### 2. Kawasan hutan rakyat;

Kawasan Hutan rakyat di Kabupaten Ciamis tersebar di 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Hutan rakyat ini telah dikembangkan sejak lama baik melalui swadaya masyarakat maupun dengan bantuan pemerintah melalui program penghijauan.

#### 3. Kawasan peruntukan pertanian

- (1) Tanaman pangan lahan basah dengan lokasi tersebar hampir di seluruh kecamatan.

- (2) Tanaman pangan lahan kering, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Hortikultura, dengan lokasi di Kecamatan Cihaurbeuti, Cikoneng, Cipaku, Jatinagara, Kawali, Lumbung, Pamarican, Panawangan, Panjalu, Panumbangan, Rajadesa, Sadananya, Sindangkasih, Sukadana dan Sukamantri.
- (4) Perkebunan, dengan lokasi perkebunan besar terdapat di Kecamatan Purwadadi, Pamarican, Banjarsari, Tambaksari, Cipaku, Kawali, Cisaga, dan lokasi perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Peternakan terdiri dari:
  - Sentra pengembangan sapi potong tersebar di Panumbangan, Panjalu, Sukamantri, Rancah Tambakasari, Pamarican dan Sadananya.
  - Sentra pengembangan ternak besar sapi perah, dengan lokasi di Kecamatan Cikoneng, Panjalu, Cihaurbeuti, dan Sidangkasih.
  - Sentra pengembangan ternak domba dan kambing tersebar di Panjalu, Lumbung, Rajadesa, Cimaragas, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Cihaurbeuti, Cidolog, Lakbok dan Sukadana
  - Sentra pengembangan ternak ayam buras tersebar di Ciamis, Cipaku, Cijeungjing, Cikoneng, Sindangkasih, Baregbeg, Rancah, Cisaga dan Sukadana.
  - Sentra pengembangan Ayam Ras Pedaging tersebar di Ciamis, Cipaku, Kawali, Panawangan, Lumbung, Jatinagara, Rajadesa, Rancah, Panjalu, Sukamantri, Panubangan, Cihaurbeuti, Sidangkasih, Cisaga dan Cijeungjing.
  - Sentra Pengembangan Ayam Ras Petelur tersebar di Cisaga, Cipaku, Sukamantri dan Panjalu.
  - Sentra Pengembangan Itik tersebar di Lakbok, Purwadadi, Panumbangan.
  - Penyediaan pakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Banjarsari, Cijeungjing, Panjalu, Kawali, Sidangkasih, Panumbangan, Sukamantri dan Panwangan.

- Pengolahan hasil peternakan berupa industri pengolahan hasil peternakan, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng, Cihaurbeuti, Panumbangan, Panjalu, Cijeungjing dan Banjarsari.

#### 4. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

##### a. Perikanan tangkap, terdiri dari:

- Perairan umum rawa, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Tambaksari, Rancah, Purwadadi.
- Perairan umum danau atau situ atau cekdam, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Pamarican, Cisaga, Tambaksari, Rajadesa, Sadananya, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Lumbung dan Sukamantri.
- Pemanfaatan danau atau situ, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- Pemanfaatan cekdam dan perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- Perairan umum sungai, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.

##### b. Budidaya perikanan terdiri dari:

- Budidaya air tawar kolam air tenang, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan.
- Budidaya air tawar kolam air deras, dengan lokasi di Kecamatan Ciamis, Cihaurbeuti, Sadananya, Kawali, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Lumbung.
- Budidaya air tawar mina padi, dengan lokasi tersebar di seluruh kecamatan kecuali Lakbok, Cidolog, Sukamantri.

##### c. Pengolahan ikan. Industri pengolahan ikan di Kecamatan Banjarsari, Lakbok, Cimaragas, Cisaga, Tambaksari, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panjalu, Panumbangan, Sindangkasih, Baregbeg dan Purwadadi.

##### d. Penyediaan prasarana perikanan, dengan lokasi di Balai Benih Udang Galah (BBUG) Kecamatan Pamarican, BBI Sukamaju Kecamatan

Baregbeg, Pasai Ikan Banagara Kecamatan Ciamis, Pasar Ikan Kecamatan Cihaurbeuti, Pasar Ikan Kecamatan Panumbangan dan Pasar Ikan Cileungsir Kecamatan Rancah.

e. Sentra Fokus Pengembangan:

- Sentra pengembangan Ikan Gurame di Panumbangan, Panjalu, Ciamis, Baregbeg, Cikoneng, Sindangkasih, Rajadesa, Banjarsari, Panjalu dan Cijeungjing
- Sentra Ikan Nila di Cijeungjing, Panumbangan, Kawali, Cipaku, Sadananya, Cisaga, Banjarsari, Ciamis dan Cihaurbeuti.
- Sentra pengembangan lele di Cikoneng, Sidangkasih, Sadananya dan Banjarsari
- Sentra Udang Galah di Pamarican, Panumbangan dan Sidangkasih.

5. Kawasan peruntukan pertambangan

a. Kawasan peruntukan mineral:

- Batu gamping, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Pamarican.
- Fosfat, dengan lokasi di Kecamatan Pamarican.
- Tras, dengan lokasi di Kecamatan Rancah.
- Kaolin, dengan lokasi di Kecamatan Cihaurbeuti.
- Mangan, dengan lokasi di Kecamatan Cimaragas.
- Pasir, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari, Pamarican, Cidolog, Cisaga, dan Lakbok.
- Andesit, dengan lokasi di Kecamatan Panjalu, Cihaurbeuti, Tambaksari, Pamarican, Banjarsari.
- Belerang, dengan lokasi di Gunung Syawal Kecamatan Cihaurbeuti.
- Marmer, dengan lokasi di Kecamatan Pamarican.
- Timbal, dengan lokasi di Gunung Syawal Kecamatan Cihaurbeuti.
- Mineral logam besi, dengan lokasi di Kecamatan Cidolog.
- Batubara, dengan lokasi di Kecamatan Lakbok, Purwadadi, Tambaksari, Cidolog.
- Dolomit, dengan lokasi di Kecamatan Banjarsari.

- b. Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud berupa energi panas bumi di Gunung Sawal Kecamatan Cihaurbeuti
  - c. Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan di wilayah usaha pertambangan, Wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah kerja pertambangan panas bumi.
  - d. Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya sesuai dengan kajian.
6. Kawasan peruntukan industri
- (1) Peruntukan industri besar diarahkan di Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Sadananya, Cijeungjing, Sukadana, Cisaga, Sindangkasih, Cihaurbeuti.
  - (2) Peruntukan industri menengah, dengan lokasi di seluruh kecamatan.
  - (3) Peruntukan industri kecil dan mikro, dengan lokasi di seluruh kecamatan.
7. Kawasan peruntukan pariwisata
- (1) Objek Wisata Budaya, terdiri dari Situ Lengkong di Kecamatan Panjalu, Astana Gede di Kecamatan Kawali, Karangkamulyan di Kecamatan Cijeungjing, Kampung Kuta di Kecamatan Tambaksari, Situs Gunung Susuru di Kecamatan Cijeungjing, Museum Fosil di Kecamatan Tambaksari, Candi Ronggeng di Kecamatan Pamarican, Cipanjalude desa bahara di Kecamatan Panjalu dan Situs Hariang Kuning dan Hariang Kencana di Kapunduhan Desa Kertamandala Kecamatan Panjalu.
  - (2) Objek Wisata Alam, terdiri dari Situ Bubuhan di Kecamatan Sukamantri.
  - (3) Objek Wisata Khusus/Minat, terdiri dari Kecamatan Panjalu berupa Curug Tujuh, Kecamatan Cihaurbeuti berupa Curug Tilu, Kecamatan Sadananya berupa Wisata Tapos, Kecamatan Cikoneng berupa Batucakra, Kecamatan Cikoneng berupa penangkaran Rusa Darmacaang dan Kecamatan Banjarsari berupa wisata air panas Cikupa.
  - (4) Obyek wisata buatan, terdiri dari Wahana wisata tirta, Wahana wisata flora, Wahana wisata fauna, Wahana permainan modern, Tempat-tempat hiburan dan atau plaza dan Museum.

8. Kawasan peruntukan permukiman

a. Peruntukan Permukiman Perkotaan terdiri dari:

- Perkotaan Ciamis, di Kelurahan Ciamis, Maleber, Kertasari, Cigembor, Benteng, Linggasari, Sindangrasa, Desa Pawindan, Panyingkiran, dan Imbanagara.
- Perkotaan Banjarsari, di Desa Banjarsari, Sukasari, Cibadak, Sindangsari, Purwasari, Sindanghayu dan Cikaso.
- Perkotaan Kawali, di Desa Kawali, Kawalimukti, Linggapura, Winduraja dan Karangpawitan.
- Perkotaan Panumbangan, di Desa Panumbangan, Tanjungmulya, Sukakarta, Golat dan Sindangherang.
- Perkotaan Cikoneng, di Desa Cikoneng, Margaluyu, Gegempalan, Sindangsari dan Cimari.
- Perkotaan Panjalu, di Desa Panjalu dan Kertamandala.
- Perkotaan Cijeungjing, di Desa Cijeungjing, Pamalayan, Ciharalang, Bojongmengger, Karangkamulyan, Handapherang, Dewasari dan Utama.
- Perkotaan Lumbung, di Desa Lumbung dan Awiluar.
- Perkotaan Jatinagara, di Desa Jatinagara, Sukanagara dan Dayeuhluhur.
- Perkotaan Rajadesa, di Desa Rajadesa, Sirnabaya dan Sirnajaya.
- Perkotaan Rancah, di Desa Rancah dan Cileungsir.
- Perkotaan Lakbok, di Desa Sukanagara.
- Perkotaan Pamarican, di Desa Pamarican, dan Neglasari
- Perkotaan Cidolog, di Desa Cidolog dan Janggala.
- Perkotaan Cimaragas, di Desa Cimaragas dan Beber.
- Perkotaan Cisaga, di Desa Cisaga dan Mekarmukti.
- Perkotaan Tambaksari, di Desa Tambaksari dan Kaso.
- Perkotaan Sukadana, di Desa Sukadana dan Margaharja.
- Perkotaan Cihaurbeuti, di Desa Cihaurbeuti, Pamokolan, Padamulya, Pasirtamiang, Sumberjaya dan Sukasetia.

- Perkotaan Sadananya, di Desa Sadananya, Bendasari, Sukajadi dan Mekarjadi.
  - Perkotaan Cipaku, di Desa Selacai, Buniseuri dan Selamanik.
  - Perkotaan Panawangan, di Desa Panawangan, Cinyasag dan Gardujaya.
  - Perkotaan Sindangkasih, di Desa Sindangkasih, Sukamanah, Sukaraja, Sukasenang, Wanasigra, Budiharja dan Gunung Cupu.
  - Perkotaan Baregbeg, di Desa Baregbeg dan Sukamaju.
  - Perkotaan Purwadadi, di Desa Sukamaju.
  - Perkotaan Sukamantri, di Desa Sukamantri dan Cibeureum.
- b. Peruntukan Permukiman Perdesaan. Permukiman perdesaan diarahkan di desa-desa yang tidak termasuk ke dalam kawasan ibukota kecamatan. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan di arahkan pada desa tertinggal, desa terpencil, desa di kawasan rawan bencana serta di desa perbatasan. Penataan kawasan permukiman perdesaan dilakukan dengan prinsip konservasi dan pengelolaan bencana. Sumber energi bagi perdesaan diarahkan pada pengembangan Desa Mandiri Energi terutama untuk perdesaan yang tidak memiliki sumber energi, hal ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di wilayah perdesaan direncanakan untuk dapat membangun sarana olah raga dan pusat/gugus kegiatan belajar.
9. Kawasan strategis kabupaten terdiri dari :
- (a) KSK Koridor Jalan Arteri Primer Cihaurbeuti-Cisaga, yaitu penanganan untuk mengendalikan perkembangan.
  - (b) KSK Situ Panjalu, yaitu penanganan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung sebagai obyek wisata.
  - (c) KSK Agropolitan di Kecamatan Sukamantri, Panumbangan, Panjalu dan Cihaurbeuti, yaitu penanganan untuk penyediaan sarana prasarana kawasan agropolitan dan program-program kawasan agropolitan.
  - (d) KSK Kawasan Perkotaan Kawali, yaitu penanganan untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan dan mendorong pertumbuhan bagi kawasan Utara Ciamis.

- (e) KSK Kawasan Perkotaan Banjarsari, yaitu penanganan untuk pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten.
- (f) KSK Lumbung Padi, yaitu penanganan KSK Lumbung Padi, yaitu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.
- (g) KSK Perbatasan Kabupaten Koridor Utara dan Koridor Barat, yaitu penanganan untuk penyesuaian infrastruktur pada kawasan perbatasan

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Ciamis terdiri dari perbukitan dan daratan yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Menurut buku Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011, secara Nasional Kabupaten Ciamis masuk dalam peringkat urutan nomor 22 Kabupaten/Kota rawan bencana tinggi dari total 494 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan di tingkat level Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis masuk dalam peringkat nomor 8 kategori rawan bencana tinggi dari total 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat (Indeks Rawan Bencana Indonesia-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011).

Bencana yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, namun juga akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini memerlukan kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap upaya mengurangi kerentanan bencana serta upaya pengurangan risiko bencana melalui kebijakan, strategi, perencanaan, atau program-program yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana secara terkoordinasi melalui SKPD terkait.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, Kabupaten Ciamis rawan akan bencana gempa bumi, gerakan tanah dan banjir. Setelah pemekaran wilayah Kabupaten Pangandaran, maka ancaman bencana tsunami dan abrasi sudah tidak menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis, karena sudah tidak mempunyai wilayah laut.

a) Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Ciamis adalah merupakan salah satu daerah bagian Selatan yang dilalui oleh 2 (dua) lempengan pertemuan antara Indo Australia dengan Eurasia yang pada suatu waktu dapat terjadi gempa bumi (BMKG Stasiun Geofisika Klas I Bandung, 2011).

Dari catatan sejarah dan fakta geomorfologi tentang letak Kabupaten Ciamis yang dilalui gerakan jalur sesar aktif atau zona gempa bumi tersebut, maka selanjutnya perlu sekali diketahui kajian Skala Intensitas atau kekuatan gelombang gempa bumi yang beberapa kali terjadi di Kabupaten Ciamis.

Skala Intensitas/Modified Mercalli Intensity Scale (MMI Scale) merupakan skala yang dipakai untuk mengukur suatu kekuatan gempa dan juga mengetahui tingkat ancaman tinggi gempa bumi. Skala MMI mempunyai 12 tingkatan intensitas gempa (I-XII). Setiap tingkatan intensitas didefinisikan berdasarkan pengaruh gempa yang didapat dari pengamatan, seperti guncangan tanah dan kerusakan dari struktur bangunan seperti gedung, jalan, dan jembatan.

Tingkat intensitas I sampai VI, digunakan untuk mendeskripsikan apa yang dilihat dan dirasakan orang selama terjadinya gempa ringan dan gempa sedang. Sedangkan tingkat intensitas VII sampai dengan XII digunakan untuk mendeskripsikan kerusakan pada struktur bangunan selama terjadinya gempa kuat.

Sesuai dengan peta Zona Rawan Gempa Bumi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Tahun 2003, Kabupaten Ciamis terbagi atas 2 zona yaitu, zona MMI IV-V dan MMI V-VI. Adapun sebaran daerah yang rawan akan bencana gempa bumi di Kabupaten Ciamis.

Tabel 2.4.  
Daerah Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis

MMI	DAERAH RAWAN GEMPABUMI
IV-V	Sukamantri, Panumbangan, Panawangan, Panjalu, Lumbung, Kawali, Rajadesa, Jatinagara, Rancah, Tambaksari, Cipaku, Ciohaurbeuti, sebagian besar Sadananya, sebagian besar Cikoneng, sebagian besar Sindangkasih, sebagian Baregbeg, sebagian besar Sukadana, sebagian Cipaku
V-VI	Sebagian Sindangkasih, sebagian Cikoneng, sebagian Sadananya, sebagian Baregbeg, sebagian Sukadana, sebagian besar Cisaga, Cijeungjing, Ciamis Cimaragas, Cidolog, Pamarican, Purwadadi, Lakbok, Banjarsari

Sumber : Peta Rawan Gempabumi di Kabupaten Ciamis (RTRW Kabupaten Ciamis 2011-2031), diolah

b) Gerakan Tanah

Jenis gerakan tanah yang sering terjadi di daerah Kabupaten Ciamis adalah longsor tanah dan material dengan tingkat waktu kejadian antara sangat lambat hingga cepat, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap waktu kejadian longsor adalah curah hujan yang tinggi yang menjenuhi tanah penutup yang sangat tebal. Oleh karena itu longsor sering terjadi pada musim hujan. Longsor sering terjadi pada daerah dengan morfologi terjal, litologi batuan relatif lunak (batupasir, batulempung atau tufa) dan tanah penutup (soil) yang cukup tebal serta tingkat curah hujan yang relatif tinggi.

Potensi bencana gerakan tanah terdapat di semua kecamatan. Sehingga seluruh kecamatan harus diwaspadai, dalam arti untuk pengembangan permukiman harus sangat hati-hati dalam menentukan lokasinya. Lahan permukiman harus berada pada tingkat kelerengan yang relatif kecil.

Sesuai dengan Peta Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Ciamis terbagi atas 4 zona, yaitu:

- Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rencah
- Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rencah
- Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah
- Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Adapaun beberapa Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki area yang termasuk dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi adalah Panawangan, Sukamantri, Rancah, Tambaksari, Cidolog, Pamarican, dan Banjarsari.

c) Banjir

Banjir di Kabupaten Ciamis dapat dikategorikan berkarakteristik genangan rata-rata tiap periode satu tahun dalam volume limpasan air yang sangat besar, kerugian material dan infrastruktur relatif besar karena dampak yang ditimbulkan. Kawasan yang teridentifikasi sebagai daerah potensi banjir di Kabupaten Ciamis terdapat di Kecamatan Cisaga, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari dan Purwadadi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang perlu mendapat perhatian khusus

2.1.4. Demografi

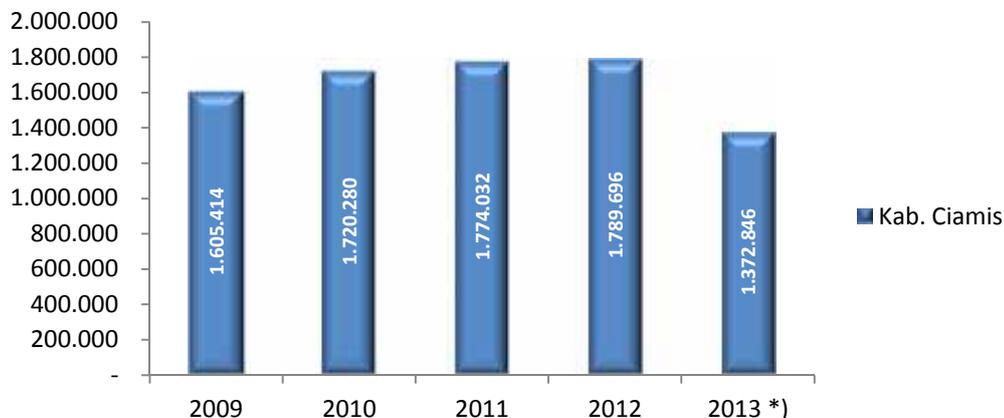
Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami pertambahan setiap tahunnya dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang semakin menurun. Setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis pada tahun 2013 adalah 1.372.846 jiwa yang terdiri dari 688.861 laki-laki dan 684.165 perempuan dengan sex ratio sebesar 100,66. Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.433,10 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kabupaten Ciamis adalah 958 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 76,94%, Jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 14,33% dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 8,73%. Dalam hal tersebut diatas, dapat diketahui angka beban tanggungan (Dependency Ratio) mencapai 45, hal ini berarti pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 45 penduduk tidak produktif.

Tabel 2.5  
Perkembangan Demografi Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk (orang)	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.789.121	1.372.846
2	Kepadatan Penduduk (km <sup>2</sup> )	657	704	726	732	958
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,68	0,47	0,46	0,43	0,47
4	Komposisi Penduduk menurut :					
	a Jenis Kelamin					
	- Laki-laki	805.079	861.688	889.918	897.597	688.681
	- Perempuan	805.335	858.592	884.114	891.524	684.165
	b Kelompok Umur (tahun)					
	0 - 4	97.823	119.062	113.157	118.359	88.844
	5 - 9	142.730	141.574	145.668	144.591	109.384
	10 - 14	143.044	148.629	150.916	152.011	119.157
	15 - 19	135.259	142.491	149.161	149.387	115.278
	20 - 24	111.653	134.056	139.014	140.465	110.440
	25 - 29	141.840	141.442	142.528	138.513	105.939
	30 - 34	121.810	130.061	135.904	140.535	112.574
	35 - 39	123.117	125.829	130.342	128.865	97.839
	40 - 44	120.156	123.147	129.214	135.859	99.771
	45 - 49	112.250	114.690	119.820	119.420	91.462
	50 - 54	96.054	106.993	110.371	112.364	86.163
	55 - 59	81549	83.398	89.421	90.244	72.160
	60 - 64	59.204	65.447	69.796	149.387	58.059
	65 - 69	119.639	143.461	148.748	140.465	105.777
5	Jumlah Keluarga	502.524	537.142	553.315	575.515	595.822
6	Jumlah Penduduk Yang Lahir	11.076	15.020	12.732	11.800	32.067
7	Jumlah Penduduk yang Mati	8.752	8.344	9.626	6.117	3.229
8	Jumlah Penduduk yang Datang	9.314	122.855	18.938	14.717	5.094
9	Jumlah Penduduk yang Pindah	8.563	14.429	15.575	11.116	7.219
10	Sex Ratio	99,97	100,36	100,66	100,68	100,66
11	Angka Beban Tanggungan	45,63	47,34	45,94	31,80	45,45

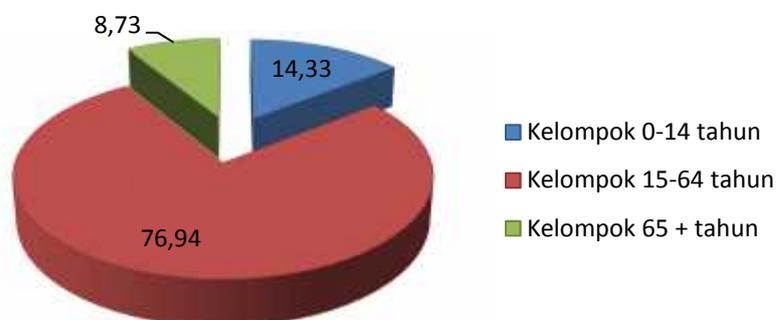
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Grafik 2.2  
Perkembangan Penduduk di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Ket. \*) Data setelah pemekaran Kabupaten Pangandaran

Grafik 2.3  
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Ciamis Tahun 2013 (%)



Penyebaran penduduk Kabupaten Ciamis terkonsentrasi di wilayah yang relatif telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Penduduk dengan kepadatan rata-rata tinggi terdapat di Kecamatan Ciamis, Baregbeg, Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti, Kawali, Lumbung sedangkan Kecamatan Cidolog dan Tambaksari mempunyai kepadatan penduduk yang paling rendah.

Tabel 2.6  
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis  
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009-2013

NO	KECAMATAN	TAHUN					KET
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Cimerak	45.159	47.363	49.995	50.126	51.264	Kabupaten Pangandaran (10 kecamatan)
2	Cijulang	25.256	27.524	28.666	28.459	28.968	
3	Cigugur	21.884	22.428	23.464	23.471	23.958	
4	Langkaplancar	44.460	49.999	52.515	52.493	53.378	
5	Parigi	31.514	44.875	46.932	46.441	47.493	
6	Sidamulih	24.983	28.927	29.930	30.284	30.926	
7	Pangandaran	47.282	55.725	57.467	58.616	59.988	
8	Kalipucang	39.415	40.581	41.156	41.960	43.004	
9	Padaherang	69.448	72.994	75.501	75.732	77.380	
10	Mangunjaya	32.338	33.641	34.958	34.925	35.687	
11	Banjasari	112.611	115.342	119.438	121.900	124.110	Kabupaten Ciamis (26 kecamatan)
12	Lakbok	48.916	59.397	60.961	61.603	62.650	
13	Pamarican	72.709	72.747	74.882	75.499	76.814	
14	Cidolog	19.959	20.465	21.059	20.903	21.396	
15	Cimaragas	16.890	16.914	17.104	17.276	17.594	
16	Cijeungjing	47.876	52.811	54.330	55.006	55.651	
17	Cisaga	38.885	39.509	40.219	40.390	40.840	
18	Tambaksari	21.249	23.464	24.040	23.793	24.342	
19	Rancah	59.455	60.497	61.808	61.874	62.766	
20	Rajadesa	47.209	56.010	58.265	58.415	59.892	
21	Sukadana	23.834	24.913	25.833	25.615	26.070	
22	Ciamis	97.168	98.952	101.133	102.215	104.557	
23	Cikoneng	52.498	55.325	57.035	57.672	59.024	
24	Cihaurbeuti	49.396	50.787	55.602	56.642	57.889	
25	Sadananya	34.666	37.456	38.993	39.370	40.597	
26	Cipaku	65.463	68.074	70.945	74.296	73.112	
27	Jatinagara	26.375	27.453	29.164	29.140	29.792	
28	Panawangan	52.167	55.421	56.859	58.125	59.346	
29	Kawali	41.867	42.699	44.131	44.557	45.374	
30	Panjalu	49.448	50.199	52.430	53.111	54.802	
31	Panumbangan	61.508	63.743	66.598	65.573	67.092	
32	Sindangkasih	48.781	50.338	54.312	54.440	55.765	
33	Baregbeg	41.507	43.719	44.356	44.474	45.415	
34	Lumbung	31.757	32.550	33.670	33.719	34.543	
35	Purwadadi	37.239	41.723	42.954	44.081	44.775	
36	Sukamantri	24.242	25.715	27.327	27.500	28.638	
	JUMLAH	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.789.696	1.372.846 452.046	Kab. Ciamis Kab.Pangandaran

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif efisien untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum kesejahteraan masyarakat, pembahasan difokuskan terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya.

### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik PDRB Atas Harga Berlaku maupun Atas Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula, sedangkan kualitas perkembangan suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun									
	2009		2010		2011		2012		2013***	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
<b>Sektor Primer</b>	<b>4.884.127,08</b>	<b>30,83</b>	<b>5.418.433,21</b>	<b>30,83</b>	<b>5.848.923,07</b>	<b>30,2</b>	<b>6.167.949,73</b>	<b>29,1</b>	<b>6.947.162,32</b>	<b>28,65</b>
1 Pertanian	4.831.886,55	30,50	5.362.673,22	30,52	5.789.464,97	29,93	6.104.565,21	28,82	6.875.873,78	28,36
2 Pertambangan dan Penggalian	52.240,53	0,33	55.759,99	0,32	59.458,11	0,31	63.384,52	0,3	71.288,54	0,29
<b>Sektor Sekunder</b>	<b>1.685.679,54</b>	<b>10,64</b>	<b>1.840.601,10</b>	<b>10,47</b>	<b>2.028.224,09</b>	<b>10,5</b>	<b>2.265.968,04</b>	<b>10,7</b>	<b>2.491.332,67</b>	<b>10,28</b>
3 Industri Pengolahan	1.063.768,20	6,72	1.179.497,24	6,71	1.311.238,76	6,78	1.481.504,93	6,99	1.651.547,16	6,81
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	102.767,50	0,65	121.438,83	0,69	140.371,83	0,73	162.720,12	0,77	175.230,20	0,72
5 Bangunan	519.143,84	3,29	539.665,03	3,07	576.613,50	2,98	621.742,98	2,94	664.555,31	2,74
<b>Sektor Tersier</b>	<b>9.271.376,23</b>	<b>58,53</b>	<b>10.313.413,78</b>	<b>58,69</b>	<b>11.467.809,22</b>	<b>59,3</b>	<b>12.746.091,60</b>	<b>60,2</b>	<b>14.808.033,43</b>	<b>61,07</b>
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.144.699,25	26,16	4.670.330,86	26,58	5.186.933,06	26,81	5.786.263,83	27,32	6.657.779,26	27,46
7 Pengangkutan dan Komunikasi	1.593.165,06	10,06	1.711.752,67	9,74	1.853.494,04	9,58	1.974.171,99	9,32	2.277.862,07	9,39
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	870.004,82	5,49	969.186,01	5,52	1.090.072,08	5,63	1.222.608,51	5,77	1.425.048,94	5,88
9 Jasa-jasa	2.663.507,10	16,81	2.962.144,24	16,86	3.337.310,04	17,25	3.763.047,27	17,77	4.447.343,16	18,34
<b>PDRB</b>	<b>15.841.182,85</b>	<b>100</b>	<b>17.572.448,10</b>	<b>100</b>	<b>19.344.956,38</b>	<b>100</b>	<b>21.180.009,36</b>	<b>100</b>	<b>24.246.528,42</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis  
Keterangan : (\*\*\*) angka sangat-sangat sementara

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis (kondisi Kabupaten Pangandaran masih bergabung dengan Kabupaten Ciamis). Hal ini ditunjukkan oleh paling besarnya kontribusi sektor pertanian berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2013 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 28,36 persen. Kontribusi sektor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi sebesar 27,46 persen. Perkembangan sektor ini pada Tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2012 yang berkontribusi sebesar 27,32 persen. Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2013 adalah sektor jasa-jasa yang memberikan kontribusi sebesar 18,34 persen. Perkembangan sektor ini pada Tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2012 yang berkontribusi sebesar 17,77 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Ciamis pada dasarnya ditunjang oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu sektor Pertanian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta sektor Jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,16 % dari total PDRB Kabupaten Ciamis. Hal ini terjadi karena karakter Kabupaten Ciamis adalah agraris dan perdagangan sehingga kontribusi sektor Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mendominasi struktur ekonomi Kabupaten. Selain itu, kontribusi sektor jasa-jasa (khususnya jasa administrasi pemerintahan dan pertanahan) memberikan kontribusi yang signifikan, hal ini merupakan sesuatu yang wajar mengingat fungsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Ciamis ditunjang dengan kelengkapan prasarana dan sarana skala Kabupaten.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp. 8,2 trilyun pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 8,6 trilyun pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi sektor PDRB terbesar tahun 2013 masih sama dengan tahun 2012 yaitu sektor Pertanian, sektor Perdagangan hotel dan restoran, serta sektor Jasa-jasa. Besaran kontribusi sektor pertanian tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012 sedangkan kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor Jasa-jasa mengalami peningkatan. Gambaran PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
PDRB Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013  
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun									
	2009		2010		2011		2012		2013 <sup>**</sup> )	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
<b>Sektor Primer</b>	<b>2.170.509,86</b>	<b>30,70</b>	<b>2.231.131,96</b>	<b>30,03</b>	<b>2.275.126,72</b>	<b>29,1</b>	<b>2.282.076,25</b>	<b>27,83</b>	<b>2.297.663,79</b>	<b>26,69</b>
1 Pertanian	2.146.691,76	30,36	2.206.873,80	29,70	2.250.368,47	28,82	2.256.817,33	27,52	2.271.891,00	26,39
2 Pertambangan dan Penggalian	23.818,10	0,34	24.258,16	0,33	24.758,26	0,32	25.258,93	0,31	25.772,79	0,3
<b>Sektor Sekunder</b>	<b>929.985,90</b>	<b>13,15</b>	<b>973.889,84</b>	<b>13,11</b>	<b>1.025.819,76</b>	<b>13,1</b>	<b>1.094.258,45</b>	<b>13,4</b>	<b>1.150.373,61</b>	<b>13,36</b>
3 Industri Pengolahan	496.904,52	7,03	529.482,65	7,13	564.922,41	7,23	612.272,42	7,47	653.758,09	7,59
4 Listrik, Gas dan Air Bersih	44.658,54	0,63	49.955,56	0,67	54.631,74	0,7	59.853,66	0,73	65.402,95	0,76

Lapangan Usaha	Tahun										
	2009		2010		2011		2012		2013 **)		
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	
5	Bangunan	388.422,84	5,49	394.451,63	5,31	406.265,60	5,2	422.132,37	5,15	431.212,57	5,01
<b>Sektor Tersier</b>		<b>3.970.697,35</b>	<b>56,15</b>	<b>4.224.835,56</b>	<b>56,86</b>	<b>4.508.216,46</b>	<b>57,7</b>	<b>4.822.890,63</b>	<b>58,81</b>	<b>5.162.109,30</b>	<b>59,95</b>
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.840.447,54	26,03	1.970.731,95	26,52	2.116.439,83	27,1	2.281.183,17	27,82	2.459.633,57	28,57
7	Pengangkutan dan Komunikasi	590.034,99	8,34	610.690,74	8,22	634.148,26	8,12	656.003,31	8	67.866,97	7,88
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	384.009,54	5,43	407.603,03	5,49	435.447,95	5,58	466.014,16	5,68	498.852,59	5,79
9	Jasa-jasa	1.156.205,28	16,35	1.235.809,84	16,63	1.322.180,42	16,93	1.419.689,99	17,31	1.524.953,44	17,71
<b>PDRB</b>		<b>7.071.193,11</b>		<b>7.429.857,37</b>		<b>7.809.162,94</b>	<b>100</b>	<b>8.199.225,34</b>	<b>100</b>	<b>8.610.146,70</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis

Keterangan : \*\*) angka sangat-sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Ciamis pada tahun 2013 masih didominasi oleh sektor tersier seperti halnya pada tahun 2012 dan kontribusinya cenderung semakin meningkat yaitu dari sebesar 58,81% pada tahun 2012 menjadi 59,95% pada tahun 2013. Sedangkan kontribusi sektor primer memiliki kecenderungan kontribusi yang menurun dari sebesar 27,83% pada tahun 2012 menjadi 26,69% pada tahun 2013 yang disebabkan adanya penurunan kontribusi sektor pertanian maupun pertambangan dan penggalan, bangunan serta Pengangkutan dan komunikasi.

#### 2.2.1.2. PDRB Per Kapita

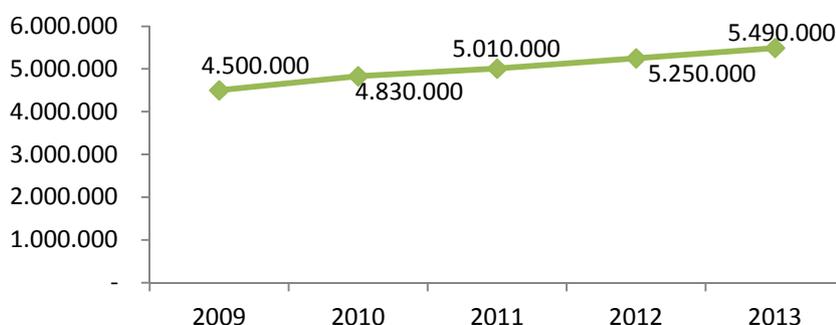
PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu meningkat dari Tahun 2012 yang mencapai 13,55 juta menjadi 15,47 juta pada Tahun 2013. Begitu pula dengan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Ciamis, pada Tahun 2012 mencapai 5,25 juta meningkat pada Tahun 2013 mencapai 5,49 juta.

Grafik 2.4



Grafik 2.5

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Ciamis Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013



### 2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

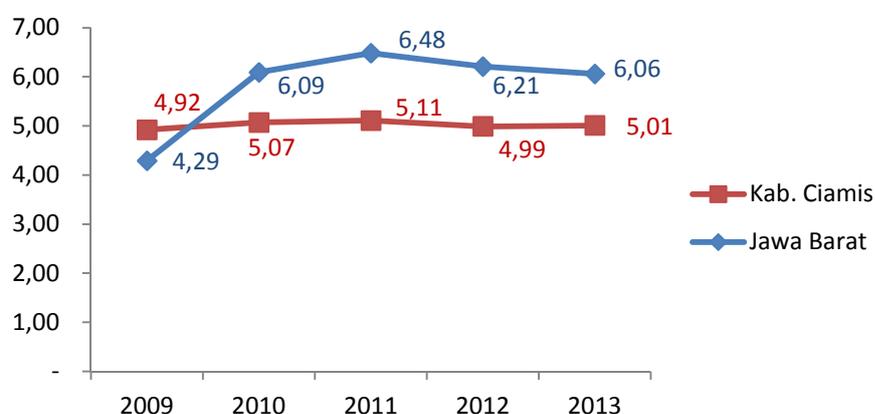
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 mengalami percepatan dibandingkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 sebesar 5,01 persen lebih cepat dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012 sebesar 4,99 persen. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan di sektor pertanian sebesar 0,38 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,01%, sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,04 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,01 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,03 % dan jasa-jasa sebesar 0,05 % Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.9  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	2,01	2,80	1,97	0,29	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	0,10	1,85	2,06	2,02	2,03
3	Industri Pengolahan	7,23	6,56	6,69	8,38	6,78
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,71	11,86	9,36	9,56	9,27
5	Bangunan	2,91	1,55	3,00	3,91	2,15
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,36	7,08	7,39	7,78	7,82
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3,84	3,50	3,84	3,45	3,46
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,79	6,14	6,83	7,02	7,05
9	Jasa-jasa	6,94	6,88	6,99	7,37	7,42
PDRB		4,92	5,07	5,11	4,99	5,01

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2013  
\*\*\*) Angka Sanga-sangat Sementara

Grafik 2.6  
Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2009-2013

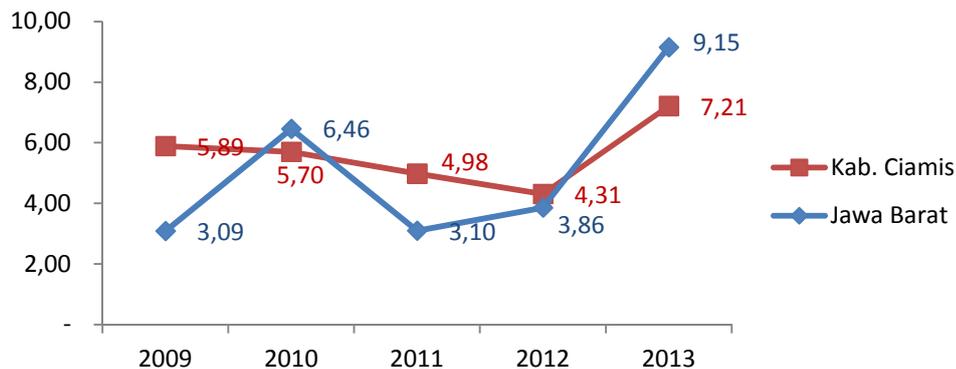


#### 2.2.1.4. Tingkat Inflasi

Pada periode 2009-2012, tingkat inflasi di Kabupaten Ciamis mengalami penurunan tetapi di Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 terjadi inflasi selama 10 bulan sedangkan deflasi terjadi selama 2 bulan yaitu pada bulan Februari dan

November. Fluktuasi kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok relatif sering terjadi sepanjang Tahun 2013 terutama kebutuhan bahan makanan pokok.

Grafik 2.7  
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013



#### 2.2.1.5. Gini Ratio

Tingkat pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan yang ditentukan oleh Bank Dunia (World Bank) adalah  $G < 0,40$  berarti ketimpangan rendah, antara  $0,40 < G < 0,50$  berarti ketimpangan sedang dan  $G > 0,50$  berarti ketimpangan tinggi. Gambaran koefisien gini atau Gini Ratio di Kabupaten Ciamis, seperti terlihat pada Tabel 2.10 dibawah ini:

Tabel 2.10  
Gini Ratio Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2012	2013
Gini Ratio	0,31	0,29	0,29	0,27	0,31	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2013

Tabel 2.10 di atas, menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai tahun 2013 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) berada pada angka  $< 0,40$  yang artinya memiliki tingkat ketimpangan rendah. Sedangkan pada

tahun 2013 kondisi gini rasio di Kabupaten Ciamis (26 Kecamatan) memiliki tingkat ketimpangan 0,31.

#### 2.2.1.6. Tingkat Kemiskinan

Permasalahan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Program-program yang dilaksanakan diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (Lima) tahun seperti terlihat pada tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11  
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013**
1	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	174.530	158.464	156.283	148.600	109.546
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,23	10,34	9,98	9,6	9,3

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2013

Tabel 2.11 diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Camis mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) Pada Tahun 2009 sebesar 11,23 % atau sebanyak 174.530 orang menurun menjadi sebesar 9,6 % atau sebanyak 148.600 orang pada tahun 2012 atau terjadi penurunan sebesar 1,63 %. Sedangkan pada tahun 2013 angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis (26 Kecamatan) sebesar 9,3 % atau sebanyak 109.546 orang. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ciamis sudah barang tentu memerlukan penerapan program-program kemiskinan yang luas serta berkelanjutan sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Perkembangan kesejahteraan sosial dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Aspek Pendidikan, Kesehatan dan

ketenagakerjaan. Indikator-indikator tersebut dapat diuraikan baik melalui angka, persentase dan rasio.

#### 2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli. Indikator yang mewakili bidang pendidikan terhadap IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH) penduduk dewasa serta Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Gambaran umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2009 – 2013 seperti terlihat pada tabel 2.12 dibawah ini:

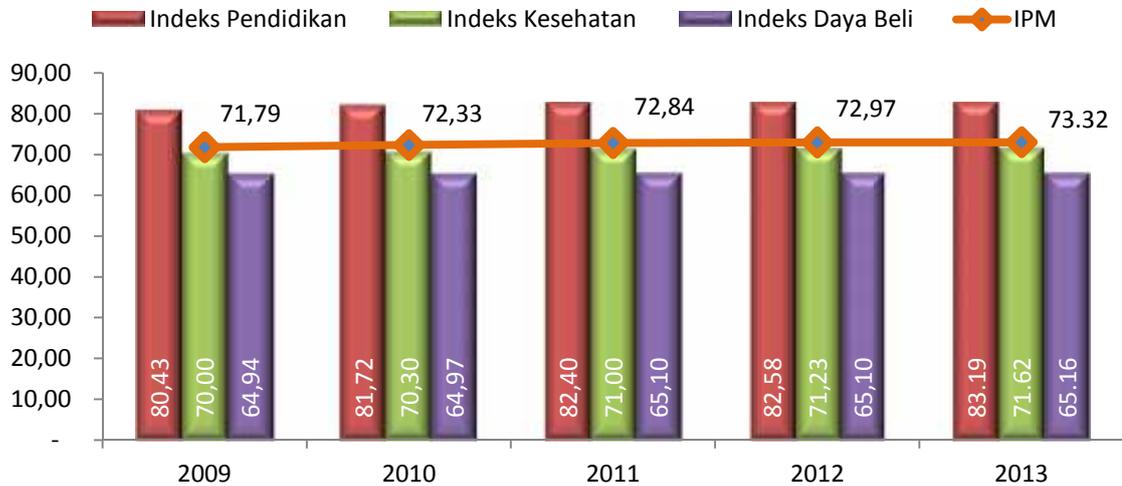
Tabel 2.12  
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

INDEKS	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Pendidikan	80,43	81,72	82,40	82,58	83,19
Indeks Kesehatan	70,00	70,30	71,00	71,23	71,62
Indeks Daya Beli	64,94	64,97	65,10	65,10	65,16
IPM	71,79	72,33	72,84	72,97	73,32

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis 2013

Tabel 2.12 di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana IPM di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) pada tahun 2009 sebesar 71,79 Point meningkat menjadi 73,32 Point pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan sebesar 1,53 Point. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peningkatan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk capaian IPM pada Tahun 2013 mencapai sebesar 73,32 Point dengan capaian Indeks Pendidikan sebesar 83,19 poin, Indeks Kesehatan sebesar 71,62 poin dan Indeks daya beli sebesar 65,16 poin. Gambaran umum kondisi IPM serta faktor-faktor pendukungnya selama 5 (lima) tahun seperti terlihat pada Grafik 2.8 dibawah ini:

Grafik 2.8  
Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Ciamis  
Tahun 2009-2013



Untuk melihat sejauh mana tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Ciamis dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, dapat dilihat seperti pada tabel 2.13 dibawah ini:

Tabel 2.13  
Perbandingan IPM Kabupaten Ciamis dengan daerah sekitar dan  
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2012

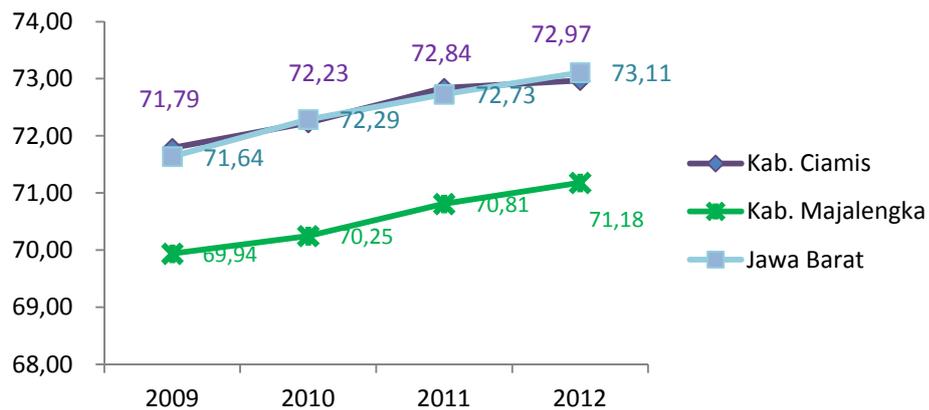
Kab/Kota	2009	2010	2011	2012
Kab. Ciamis	71,79	72,23	72,84	72,97
Kab. Majalengka	69,94	70,25	70,81	71,18
Kab. Kuningan	72,15	72,61	72,82	72,89
Kab. Tasikmalaya	71,67	71,88	72,18	72,93
Kota Banjar	74,25	74,67	74,95	76,39
Kota Tasikmalaya	73,96	74,4	74,85	75,35
Jawa Barat	71,64	72,29	72,73	73,11

Sumber :Pusdalitbang Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.13 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ciamis berada diatas Kabupaen Majalengka, Kuningan dan Tasikmalaya. Namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya masih berada dibawah, termasuk jika

dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat. Gambaran umum kondisi IPM antara Kabupaten Ciamis, Majalengka dan Prpinsi Jawa Barat seperti terlihat pada Grafik 2.9 dibawah ini:

Grafik 2.9  
IPM Kabupaten Ciamis, Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2009-2013

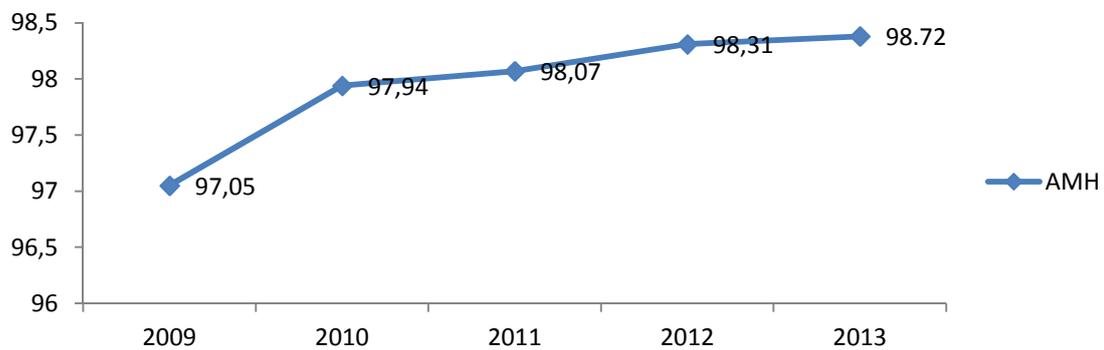


Untuk lebih mengetahui sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks daya beli, dapat terlihat sebagai berikut:

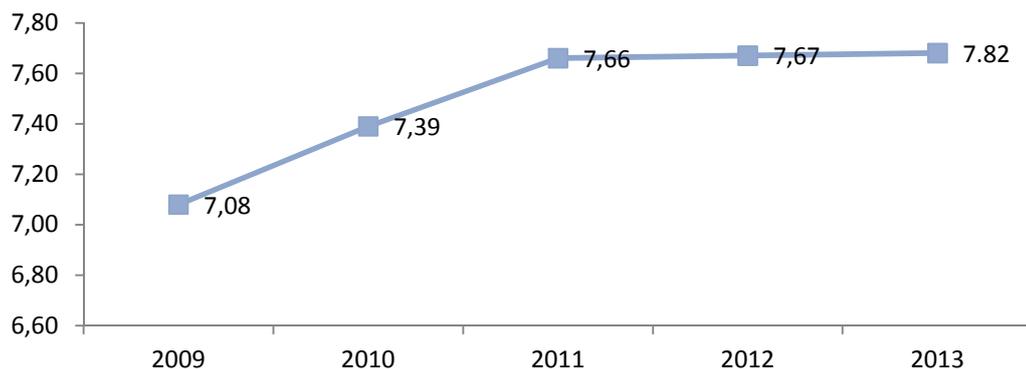
a) Indeks Pendidikan

Komponen dalam Indikator Indeks Pendidikan terdiri dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan AMH dan RLS di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2009-2013 mempunyai kecenderungan meningkat tiap tahunnya, walaupun angka kenaikannya masih relatif kecil. Gambaran tersebut dapat terlihat seperti pada grafik 2.10 dan 2.11 dibawah ini:

Grafik 2.10  
Perkembangan AMH di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



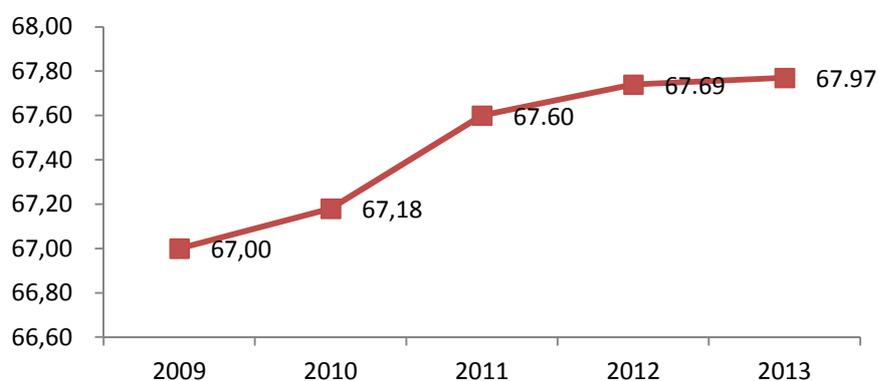
Grafik 2.11.  
Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



b) Indeks Kesehatan

Komponen dalam Indeks Kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut data dari BPS Kabupaten Ciamis, perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2009 – 2013 setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun masih dalam posisi 67,97 tahun. Gambaran perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis seperti terlihat pada Grafik 2.12 dibawah ini:

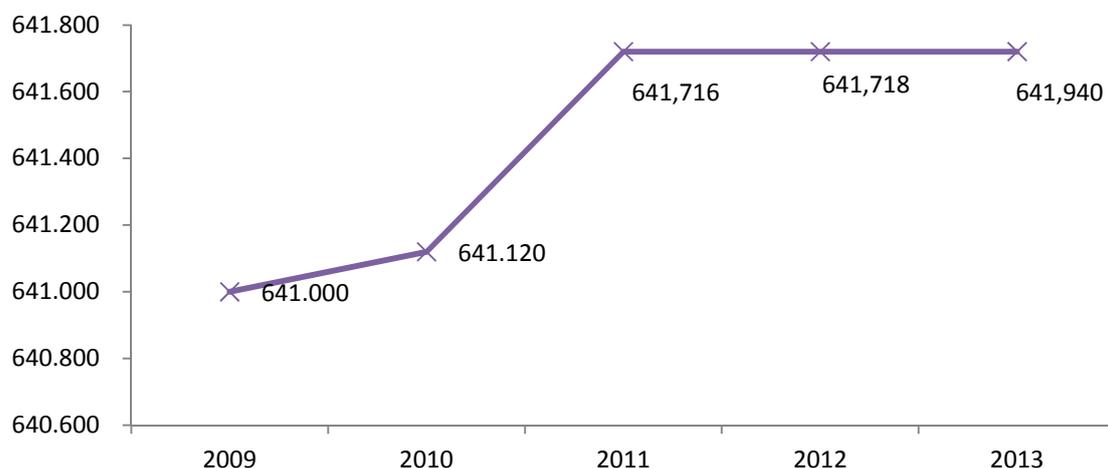
Grafik 2.12  
Perkembangan AHH di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



c) Indeks Daya Beli

Komponen dalam Indeks Daya Beli Masyarakat adalah Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP). Perkembangan indeks daya beli di Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2009-2013, seperti terlihat pada grafik 2.13 dibawah ini:

Grafik 2.13  
Perkembangan Paritas Daya Beli di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013



2.2.2.2. Pendidikan

Analisis kinerja atas bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Drop Out

(DO). Perkembangan indikator dimaksud selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dari 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14  
Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Ciamis  
Tahun 2009 s.d 2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Indeks Pendidikan	80,43	81,72	82,40	82,58	83,19
2	RLS (Tahun)	7,08	7,39	7,66	7,67	7,82
3	AMH %	97,05	97,94	98,07	98,31	98,72
4	APK					
	- SD/MI (%)	107,34	107,34	103,26	107,9	104,87
	- SMP/MTs (%)	98,18	99,44	98,25	98,99	98,14
	- SMA/SMK/MA (%)	44,87	51,35	54,00	52,75	59,87
5	APM					
	- SD/MI (%)	99,74	97,6	97,35	99,85	98,72
	- SMP/MTs (%)	92,76	96,68	96,75	95,77	96,54
	- SMA/SMK (%)	41,87	44,11	46,55	47,75	51,91
6	Drop Out					
	- SD/MI(%)	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
	- SMP/MTs(%)	0,05	0,07	0,05	0,04	0,04
	- SMA/SMK/MA(%)	0,45	0,40	0,37	0,11	0,11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 2013

Tabel 2.14 diatas memperlihatkan bahwa Indeks Pendidikan selama Tahun 2009-2013 mengalami peningkatan walaupun peningkatannya relative kecil. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih relatif rendah hanya mencapai 7,08 tahun pada Tahun 2009 dan 7,82 tahun pada Tahun 2013, walaupun secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan Angka Melek Huruf (AMH) di periode 2009-2013 masih menunjukkan angka 98,72 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah relatif tinggi kecuali untuk APKSMA/SMK/MA baru mencapai 59,87% pada Tahun2013. Demikian pula Angka Partisipasi Murni (APM) kecuali untuk APMSMA/SMK baru mencapai 51,91% pada Tahun 2013. Begitu pula untuk Angka Drop Out (DO) sebagian besar terjadi pada tingkat pendidikan SMP/MTS serta SMA/SMK/MA.

### 2.2.2.3. Kesehatan

Indikator makro bidang kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15  
Capaian Aspek Kesehatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KABUPATEN CIAMIS				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	67	67,18	67,67	67,74	67,97
2	Angka Gizi Buruk	0,30	0,23	0,22	0,24	0,15
3	Angka Kematian Bayi/1.000 KH	40,22	39,48	38,91	37,70	28,30
4	Jumlah Kematian Ibu	28	27	26	23	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dan BPS Kabupaten Ciamis, 2013

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mencapai 67,74 Tahun, sedangkan pada tahun 2013 kondisi di Kabupaten Ciamis (26 Kecamatan) mencapai 67,97 Tahun. Hal ini menunjukkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta peran pemerintah didalam upaya pelayanan kesehatan semakin baik. Peningkatan AHH didukung pula oleh menurunnya prevalensi balita gizi buruk yang cenderung mengalami penurunan. Demikian juga dengan Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012 (36 Kecamatan ) mencapai sebesar 37,70/1.000 KH dan pada tahun 2013 (26 Kecamatan) mencapai sebesar 28,30/1.000 KH, jauh mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 40,22/1.000KH. Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Ciamis (36 Kecamatan) pada tahun 2009 sebanyak 28 kasus menurun menjadi 23 kasus di tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 (26 Kecamatan ) berjumlah 18 Kasus. Prevalensi Gizi Buruk (AGB) pada Balita dimasyarakat pada tahun 2009 sebesar 0,30 Persen menurun menjadi sebesar 0,24 pada tahun 2012, sedangkan kondisi pada tahun 2013 (26 Kecamatan) sebesar 0,15 %.

Berdasarkan tabel di atas, keempat indikator makro bidang kesehatan selama kurun waktu 5 Tahun cenderung mengalami peningkatan kinerja, sedangkan untuk capaian indikator gizi buruk cenderung fluktuatif. Keberhasilan tersebut Antara lain dipengaruhi oleh

- Kontinuitas intervensi penanganan gizi buruk
- Program pemberdayaan keluarga sadar gizi
- Peningkatan pelayanan konseling di setiap level pelayanan kesehatan dasar
- Sinergitas program melalui Kementerian Kesehatan dalam upaya promotif dan preventif melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terutama pada tingkat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan
- Intensitas promosi kesehatan melalui berbagai media dengan tidak meninggalkan kearifan lokal budaya
- Meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya terhadap pemanfaatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan serta Implementasi deteksi dini risiko tinggi pada kehamilan persalinan dan nifas.

#### 2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dapat terlihat dari jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, Tingkat Kesempatan Kerja dan Upah Minimum. Secara rinci perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16  
Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kesempatan Kerja dan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Ciamis Tahun 2009 s.d. 2013

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Angkatan Kerja (orang)	776.993	761.982	711.501	790.395	785.000
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,94	5,39	8,44	5,28	5,20

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
3	Tingkat Kesempatan Kerja	93,69	94,88	91,56	94,72	94,80
4	Upah Minimum Kabupaten (Rp)	636.195	699.815	741.800	793.750	854.075

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.16 menunjukkan bahwa Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ciamis sebanyak 785.000 orang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 790.395 orang. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan kesempatan kerja yang berdampak terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni dan budaya pada dasarnya bertujuan untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan yang merupakan ciri dari suatu bangsa. Gambaran kondisi seni dan budaya di Kabupaten Ciamis seperti terlihat pada tabel 2.17 dibawah ini:

Tabel 2.17  
Kelompok Kesenian, Kebudayaan dan Situs  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	SATUAN
1	Jumlah grup kesenian	646	646	646	646	523	grup
2	Jumlah gedung Kesenian	0	0	0	0	0	tempat
3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	10	tempat
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	325	325	325	325	331	situs

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

Tabel 2.17 diatas menunjukkan bahwa perkembangan grup kesenian mengalami penurunan di Tahun 2013, sedangkan sarana penyelenggara seni dan budaya dan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun

2009 sampai dengan tahun 2012 tidak mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian dan sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak ada.

Pengembangan bidang olahraga, difokuskan pada pemenuhan peningkatan kualitas generasi muda melalui penyediaan fasilitas olah raga. Jumlah organisasi olah raga serta data gedung olah raga yang ada di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini:

Tabel 2.18  
Jumlah Organisasi Olahraga dan Gedung Olahraga  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Klub Olahraga	278	314	323	338	248
2	Jumlah Gedung Olahraga	163	179	185	191	141

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa jumlah klub dan gedung olah raga dan jumlah gedung kesenian dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2013 kedua indikator tersebut mengalami penurunan.

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

Berikut ini disajikan beberapa analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

#### 1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tingkat pendidikan di suatu daerah dapat terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

##### a) Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Ciamis, sebagaimana pada tabel 2.19 sebagai berikut:

Tabel 2.19  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2009 – 2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	1.287	1.286	1.284	1.282	913
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun	162.587	167.123	169.103	170.107	80.868
1.3.	Rasio	1:126	1:129	1:131	1:132	1:89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	370	373	374	378	196
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun	89.927	89.177	86.959	91.362	65.653
2.3.	Rasio	1:243	1:239	1:232	1:241	1:335
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	138	138	138	141	109
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16 – 18 Tahun	83.007	82.827	82.977	82.951	50.918
3.3.	Rasio	1:601	1:600	1:601	1:588	1:467

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa daya tampung sekolah SD/MI terhadap murid SD/MI pada tahun 2013 adalah 1 berbanding 89 orang, untuk daya tampung sekolah SMP/MTs adalah 1 berbanding 335 orang, serta untuk SMA/SMK/MA adalah 1 berbanding 467 orang.

b) Rasio guru/murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Ciamis disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.20  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru (orang)	10.338	10.298	10.418	10.084	4.752
1.2.	Jumlah Murid (orang)	187.235	184.210	174.500	170.855	80.787
1.3.	Rasio	18	18	17	17	17
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	2.154	2.254	2.254	2.257	5.695
2.2.	Jumlah Murid (orang)	87.821	85.652	84.974	86.657	63.664
2.3.	Rasio	41	38	38	38	38
3	SMA/SMK/MA					
3.1.	Jumlah Guru (orang)	876	871	901	987	773
3.2.	Jumlah Murid (orang)	32.240	32.240	34.819	37.076	30.149
3.3.	Rasio	37	37	39	38	39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2009 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 18 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 18 anak, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 17. Pertumbuhan rasio guru/murid jenjang SD/MI setiap tahun relatif sama sesuai dengan pertambahan jumlah guru dan jumlah murid. Jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2009 rasio guru/murid sebesar 41, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 38. Jenjang pendidikan SMA/MA pada tahun 2009 rasio guru/murid sebesar 37, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 39.

## 2. Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Oleh karena itu seluruh komponen terkait harus berperan aktif terutama dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selama kurun 5 (lima) tahun (2009-2013) pencapaian kinerja bidang kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.21  
Capaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio posyandu persatuan balita.	9,27	18,08	16,38	25,8	23,23
2	Rasio puskesmas persatuan penduduk.	0,032	0,030	0,029	0,029	0,027
	Rasio poliklinik per satuan penduduk.	-	-	-	0,007	0,014
	Rasio pustu per satuan penduduk.	0,074	0,069	0,068	0,067	0,0619
3	Rasio RS per satuan penduduk.	0,003	0,003	0,003	0,002	0,0029
4	Rasio dokter per satuan penduduk.	0,049	0,057	0,047	0,055	0,0881
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk.	0,071	0,078	0,075	0,091	0,7044
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%).	76,92	77,33	78,27	79,93	89,18
7	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%).	42,3	67,1	85,3	95,2	97,35
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%).	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%).	53,74	63,6	79,7	86,1	88,41
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%).	100	100	100	100	100
11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%).	71,06	59,39	59,47	51,26	50,67
12	Cakupan kunjungan bayi (%).	66,26	68,41	72,76	81,27	86,31
13	Jumlah Puskesmas (buah).	51	51	52	52	37
14	Jumlah pembantu Puskesmas (buah).	118	119	120	120	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2009 (36 kecamatan) rasio posyandu persatuan balita sebesar 9,27, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi 23,23. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecukupan jumlah posyandu yang tersedia di wilayah Kabupaten Ciamis

Untuk rasio puskesmas persatuan penduduk pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 0,032, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 0,027. Untuk rasio RS persatuan penduduk pada

tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 0,003, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 0,0029. Untuk rasio dokter persatuan penduduk pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 0,049, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 0,0881. Untuk cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 100, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) masih tetap sebesar 100.

Untuk cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 53,74, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 88,41. Untuk cakupan kunjungan bayi pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 66,26, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 86,31. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran ibu untuk memeriksakan bayinya ke fasilitas kesehatan.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.22  
Capaian Indikator Pekerjaan Umum di  
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kemantapan jalan (%)	37,14	29,02	30,58	34,80	44,24
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	286,87	224,11	236,17	268,76	211,55
3	Sistem informasi /data base jalan (%)	0	0	0	0	0
4	Jumlah alat berat dalam kondisi baik (unit)	40	40	40	40	45
5	Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik (Km)	205,4	208,4	211,4	214,4	217,42
6	Panjang jalan desa di kawasan strategis dan	208,2	210,2	212,2	214,2	216,2

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik (Km)					
7	Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik (Km)	206,1	207,3	208,7	210,2	209,3
8	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	0,291 (0,291)	0,292 (0,71 kumulatif)	0,342 (1,06 kumulatif)	0,343 (1,35 kumulatif)	20,727
9	Persentase Luas Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik	47,0 %	50,8 %	52,1 %	52,1 %	59,6 %
10	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	0,79	1,62	2,39	3,16	4,12
11	Panjang drainase yang belum terbangun (m)	46.786,20	46.786,20	46.786,20	46.786,20	36.786,20
12	Panjang drainase yang dipelihara (m)	273,6	286	269,1	264,7	1.427,2
13	Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir (%)	72,22	72,22	75	75	88,46
14	Panjang saluran sungai yang dinormalisasi (m)	-	-	4.243,4	603,26	4.219,86
15	Panjang bangunan proteksi sungai (m)	-	-	2.289,7	800,16	2.881,21

Sumber : Dinas Bina Marga SDA dan ESDM dan DCKKTR Kabupaten Ciamis

#### a. Kemantapan Jalan (%)

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. Setelah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran, maka panjang jalan kabupaten Ciamis menjadi sepanjang 478,11 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 211,55 km, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baiknya sebesar 44,25 %.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir peningkatan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif kecil bahkan terkesan relatif datar atau jalan

ditempat. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun pertama atau tahun 2009 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang mempengaruhi terhadap daya dukung atau kestabilan tanah dasar jaringan jalan yang proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada waktu itu sudah mencapai 37,14 % sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 29,02 % atau mengalami turun sebesar 8,12 % mengingat anggaran pada tahun 2010 lebih diprioritaskan pada upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan sektor lainnya yang rusak akibat bencana alam gempa bumi sedangkan untuk penanganan jalan hanya bersifat penanganan darurat ( holding ) saja. Penanganan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam gempa bumi baru bisa dilakukan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama 3 tahun terakhir kembali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 mencapai 30,58 %, tahun 2012 mencapai 34,8 % dan pada tahun 2013 mencapai 39,88 %. Namun jika melihat perkembangan yang ada maka kemampuan APBD Kabupaten Ciamis dalam 1 tahun hanya bisa meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik rata-rata sebesar 3 % sehingga untuk mencapai proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kondisi jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah min 60 % atau tersisa sebesar 22 % dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun kedepan untuk pencapaian SPM tersebut.

b. Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)

Panjang jalan Kabupaten sebelum dan sesudah terbentuknya Kabupaten Pangandaran mengalami perubahan, dari semula sepanjang 772,31 km menjadi sepanjang 478,11 km, sehingga panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pun mengalami perubahan, yang semula sepanjang 308,3 km menjadi 211,55 km.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2009-2013), panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis mengalami

perubahan. Pada tahun 2009 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sudah mencapai 286,87 km. Namun pada akhir tahun 2009 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang mempengaruhi terhadap daya dukung atau kestabilan tanah dasar jaringan jalan yang ada sehingga panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 224,11 km mengingat anggaran pada tahun 2010 lebih diprioritaskan pada upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan sektor lainnya yang rusak akibat bencana alam gempa bumi sedangkan untuk penanganan jalan hanya bersifat penanganan darurat (holding) saja. Penanganan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam gempa bumi baru bisa dilakukan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sehingga panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama 3 tahun terakhir kembali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 mencapai 236,17 km, tahun 2012 mencapai 268,76 km dan pada tahun 2013 mencapai 308,30 km.

Sedangkan panjang jalan kabupaten sesuai SK Bupati Ciamis No 620/Kpts.540-Huk./2012 adalah sepanjang 772,31 km dengan kondisinya rusak berat dan rusak ringan masih mencapai panjang 301,43 km, yang kondisinya saat ini perlu segera dilakukan penanganan secara efektif dan efisien

c. Sistem Informasi/ Data Base Jalan

Sistem Informasi/Data Base Jalan merupakan suatu sistem informasi mengenai jaringan jalan di Kabupaten Ciamis sebagai bahan perencanaan penanganan jalan sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Selama ini sebagai bahan perencanaan penanganan jalan, masih menggunakan sistem manual sehingga belum terintegrasi dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Ciamis. Sistem tersebut direncanakan akan mulai dibuat pada Tahun 2015.

d. Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik

Alat berat sangat dibutuhkan keberadaannya dalam membantu pekerjaan penanganan infrastruktur jalan baik peningkatan maupun

pemeliharaan serta untuk penanganan bencana alam. Alat berat yang dimiliki Kabupaten Ciamis sampai dengan saat ini berjumlah 47 unit dan yang berfungsi baik pada tahun 2013 berjumlah 44 unit. Alat berat tersebut dikelola dan dipelihara oleh UPTD Alat Berat Dinas Bina Marga SDAESM

- e. Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Agropolitan dalam kondisi baik.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan merupakan suatu kawasan potensial atau strategis di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Panumbangan, Sukamantri, Panjalu dan Lumbung dan sudah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2012 mengenai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan, sehingga untuk meningkatkan akses sarana transportasi barang dan jasa dari area produksi menuju tempat pemasaran perlu didukung dengan infrastruktur jalan desa yang memadai.

- f. Panjang jalan desa di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kawasan Lumbung Padi dalam kondisi baik

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lumbung Padi merupakan kawasan yang diarahkan untuk pengembangan pangan, khususnya tanaman padi, baik kebijakan pengembangan budidaya, peningkatan produksi hingga strategi pemasaran gabah. Sementara wilayah yang ditetapkan masuk di dalam KSCT Lumbung Padi adalah Kecamatan Banjarsari, Lakbok dan Purwadadi, sehingga untuk mendukung pengembangan KSCT tersebut diperlukan sarana jalan desa dalam kondisi baik dimulai dari jalan di areal pertanian yang terhubung dengan jalan menuju areal pemasaran.

- g. Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam kondisi baik

Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Ciamis, ada beberapa PKL yang sudah ditetapkan, yaitu PKL Ciamis, Banjarsari, Kawali, Cijeungjing, Sindangkasih-

Cikoneng, Rancah, Panjalu, Pamarican dan Cijulang-Parigi. Khusus untuk Cijulang – Parigi masuk wilayah DOB Pangandaran. Sebagai wilayah yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai pusat pelayanan barang dan jasa sehingga dibutuhkan sarana infrastruktur jalan yang memadai dan representatif.

h. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dengan luas area pertanian, sedangkan Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik adalah perbandingan antara panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dengan luas area pertanian.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, angka rasio jaringan irigasi terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Ciamis secara bertahap sudah terairi oleh saluran irigasi dengan baik meskipun peningkatannya relative kecil dimana pada tahun 2009 ratio jaringan irigasi sebesar 0,291, tahun 2010 sebesar 0,292, tahun 2011 sebesar 0,342, tahun 2012 sebesar 0,343 dan pada tahun 2013 menjadi 0,370. Dalam rangka mendukung pertanian yang berkelanjutan maka perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat pengembangan sistem jaringan irigasi agar luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Ciamis seluruhnya dapat terairi dengan saluran irigasi yang memadai sehingga rasio jaringan irigasi di Kabupaten Ciamis bisa mencapai angka 1, diantaranya dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pengembangan sistem jaringan irigasi (teknis/semi teknis/desa) dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan yang dalam prosesnya pelaksanaannya mengikutsertakan atau kerjasama operasional (KSO) dengan P3A Mitra Cai;
2. Melakukan pengelolaan sistem jaringan irigasi (teknis/semi teknis/desa) dengan kegiatan rehabilitasi dan operasi dan pemeliharaan (OP) yang disesuaikan dengan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) yang pelaksanaannya mengikutsertakan P3A Mitra Cai;
3. Melakukan upaya-upaya dalam menjaga ketersediaan air baku pengairan dengan bekerjasama dengan P3A Mitra Cai;

4. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara intensif terhadap jaringan irigasi yang sudah beroperasi bersama-sama P3A Mitra Cai agar dapat terjaga kelestarian dan keberlanjutannya.

Dengan demikian angka rasio jaringan irigasi setiap tahunnya dapat meningkat sampai mencapai angka ratio 1 sehingga pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Ciamis dapat segera terwujud dan target SPM bidang irigasi sebesar min 70 % bisa tercapai.

- i. Persentase Luas Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik

Persentase Luas Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik adalah perbandingan antara luas daerah irigasi teknis kewenangan kabupaten dalam kondisi baik seluas 2.807,93 Ha, dengan luas daerah irigasi teknis kewenangan kabupaten secara keseluruhan seluas 4.878,91 Ha. Sehingga Persentase luas Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik adalah sebesar 59,61 %.

- j. Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik

Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir setiap tahunnya mengalami peningkatan secara terus menerus. Hal ini disebabkan karena terpeliharanya saluran-saluran drainase yang tersumbat di Wilayah Perkotaan Ciamis. Sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Ciamis Pada Tahun 2009 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air adalah 273,6 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 0,79%. Sampai Tahun 2010 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air adalah 559,6 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 1,62%. Sampai Tahun 2011 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air adalah 828,7 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 2,39%. Sampai Tahun 2012 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air

adalah 1.093,4 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 3,16%. Pada Tahun 2013 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air adalah 1.427,2 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 4,12%. Pada Tahun 2013 Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air setelah berpisah dengan DOB Pangandaran adalah 1.427,2 m dan Panjang Seluruh Drainase di Daerah Perkotaan Kabupaten adalah 34.625 m sehingga Persentase/Rasio Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik adalah 4,12%.

k. Panjang drainase yang belum terbangun (m)

Pembangunan drainase dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya terdapat di wilayah perkotaan Ciamis, sementara untuk wilayah Kota Kecamatan lainnya belum mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga panjang drainase yang belum terbangun di wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari penataan kota kecamatan, masih banyak yang belum terbangun

l. Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir (%)

Proporsi jumlah kecamatan yang bebas banjir adalah jumlah kecamatan yang bebas banjir tahunan dibagi dengan jumlah kecamatan keseluruhan, dimana pada tahun 2009 sampai 2010 terdapat 10 kecamatan yang rawan banjir tahunan, yaitu Kecamatan Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Banjarsari, Purwadadi, Lakbok, Pamarican, Parigi, Cijulang dan Mangunjaya, artinya jumlah kecamatan yang bebas banjir sebanyak 26 kecamatan. Sedangkan untuk tahun 2011 samapai 2013 jumlah kecamatan yang bebas banjir menjadi 27 kecamatan, dimana untuk Kecamatan Lakbok sudah jarang mengalami banjir tahunan. Sedangkan untuk tahun 2013 setelah berpisah dari DOB Pangandaran Jumlah Kecamatan yang rawan banjir adalah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari, Purwadadi dan Pamarican, artinya jumlah kecamatan yang bebas banjir sebanyak 23 kecamatan dari 26 kecamatan

m. Panjang saluran sungai yang dinormalisasi (m)

Kegiatan normalisasi sungai dan saluran dilaksanakan untuk menormalkan kembali aliran saluran dan sungai dengan cara melakukan pembuangan lumpur pada saluran atau sungai, sehingga dengan normalnya saluran dan sungai akan mengurangi terjadinya bencana banjir di sekitar aliran sungai dan saluran, disamping itu juga aliran air akan lebih lancar menuju ke area pertanian dan irigasi.

n. Panjang bangunan proteksi sungai (m)

Kegiatan pembangunan proteksi sungai adalah diperuntukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh efek erosi dan abrasi aliran air, sehingga akan mencegah dan menanggulangi kerusakan tebing sungai & longsor yang akan berakibat pada terancamnya lingkungan di sekitar sungai.

#### 4. Urusan Perumahan

Indikator bidang perumahan di Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.23  
Capaian Indikator Perumahan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan (%)	0	0	0	0	33,51
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan (%)	0,613	2,72	4,49	6,65	10,78
3	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	24	26	28	30	34
4	Rasio Rumah Layak Huni	0,009	0,015	0,031	0,135	0,327
5	Persentase Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk (%)	0,042	0,039	0,038	0,037	0,050
6	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
7	Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK (wilayah manajemen kebakaran) (%)	66,66	66,66	68	53,13	66,66
8	Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (orang)	0	0	0	0	3
9	Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar layak pakai (%)	11,11	11,11	11,11	11,11	11,53

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM Kabupaten Ciamis

#### a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan

Untuk Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan pada tahun 2013 adalah sebesar 30,07% dimana Jumlah Penduduk terlayani Pada Tahun 2013 adalah 133.460 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan adalah 443.831 jiwa. Ketika Kabupaten Ciamis Berpisah dengan DOB Pangandaran maka Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan adalah 33,51% dimana Jumlah Penduduk terlayani Pada Tahun 2013 setelah berpisah dengan DOB Pangandaran adalah 118.507 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan adalah 353.612 jiwa.

Untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sistem penyediaan air bersih ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan pada sistem penyediaan air bersih yang sudah terbangun, dengan pola partisipatif masyarakat.
2. Melakukan fasilitasi optimalisasi kelembagaan dalam pengelolaan sistem penyediaan air bersih.
3. Melakukan upaya-upaya untuk melestarikan ketersediaan air baku, misalnya dengan pembuatan sumur-sumur resapan, pembuatan biopori, optimalisasi penampungan air (embung, broncaptering).

Dengan demikian diharapkan pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal untuk air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan bisa terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari bisa tercapai.

#### b. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Itu dikarenakan meningkatnya jumlah desa penerima bantuan pembangunan air bersih sehingga meningkat pula jumlah jiwa yang menikmati air bersih. Sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna

Air Bersih di Perdesaan Pada Tahun 2009 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 9.843 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2009 adalah 1.605.414 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengan Air Bersih di Perdesaan adalah 0,613%. Sampai Tahun 2010 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 46.818 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2010 adalah 1.720.280 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 2,72%. Sampai Tahun 2011 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 79.706 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2011 adalah 1.774.032 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 4,49%. Sampai Tahun 2012 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 118.909 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2012 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 6,65%. Sampai Tahun 2013 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 148.319 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 8,29%. Sampai Tahun 2013 Jumlah Pengguna Air Bersih setelah berpisah dengan DOB Pangandaran adalah 145.084 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.346.133 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 10,78%.

c. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.

Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Ciamis dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup bermakna. Pada tahun 2009 persentase rumah tangga bersanitasi di kabupaten ciamis sebesar 24% dan pada tahun 2013 mencapai 34%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tangga bersanitasi.

d. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni yang ada di Kabupaten Ciamis di Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pusat dalam hal

penanganan rumah tidak layak huni. Tetapi masih diperlukannya upaya fasilitasi untuk bantuan perbaikan rumah swadaya untuk masyarakat miskin dan perumahan formal bagi pengembang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga prosentase rumah layak huni di Kabupaten Ciamis bisa mencapai 100 %. Pada Tahun 2009 Jumlah Rumah Layak Huni adalah 150 unit dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2009 adalah 1.605.414 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Layak Huni adalah 0,009%. Pada Tahun 2010 Jumlah Rumah Layak Huni adalah 100 unit dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2010 adalah 1.720.280 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Layak Huni adalah 0,015%. Pada Tahun 2011 Jumlah Rumah Layak Huni adalah 300 unit dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2011 adalah 1.774.032 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Layak Huni adalah 0,031%. Pada Tahun 2012 Jumlah Rumah Layak Huni adalah 1878 unit dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2012 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Layak Huni adalah 0,135%. Pada Tahun 2013 Jumlah Rumah Layak Huni adalah 1971 unit dan Jumlah Penduduk pada Tahun 2013 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Layak Huni adalah 0,246%.

e. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Itu dikarenakan luas wilayah pemakaman yang relatif tetap, tetapi jumlah penduduk setiap tahunnya terus bertambah. Pada Tahun 2009 Luas Wilayah Pemakaman adalah 678,1673 ha sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2009 adalah 1.605.414 jiwa sehingga rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah 0,042%. Pada Tahun 2010 Luas Wilayah Pemakaman adalah 678,1673 Ha sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2010 adalah 1.720.280 jiwa sehingga Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah 0,039%. Pada Tahun 2011 Luas Wilayah Pemakaman adalah 678,1673 Ha sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2011 adalah 1.774.032 jiwa sehingga Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah 0,038%. Pada Tahun

2012 Luas Wilayah Pemakaman adalah 678,1673 Ha sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2012 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah 0,037%. Pada Tahun 2013 Luas Wilayah Pemakaman adalah 678,1673 Ha sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah 0,037%. Pada Tahun 2013 Luas Wilayah Pemakaman Setelah Berpisah Dengan DOB Pangandaran adalah 678,1673 Ha sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.346.133 jiwa sehingga Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk adalah 0,050%.

f. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terakhir peningkatan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif kecil bahkan terkesan relatif datar atau jalan ditempat. Itu dikarenakan kurangnya pos WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) di Wilayah Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2009 - 2013 Luas WMK adalah 353,56 km<sup>2</sup> sedangkan Luas Potensi Kebakaran adalah 2.444,79 km<sup>2</sup> sehingga Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah 14,44%. Sedangkan untuk Tahun 2013 ketika Kab. Ciamis berpisah dengan DOB Pangandaran Luas Potensi Kebakaran adalah 176,78 km<sup>2</sup> sedangkan Luas Potensi Kebakaran adalah 1.433,87 km<sup>2</sup> sehingga Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran adalah 12,33%.

g. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK).

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terakhir peningkatan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif kecil bahkan terkesan relatif datar atau jalan ditempat. Itu dikarenakan menurunnya jumlah angka kejadian kebakaran dan kebakaran yang terjadi ada dalam jarak waktu tanggap (15 menit). Pada tahun 2009 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani adalah 6 kasus sedangkan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 9 kasus sehingga Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 66,66%. Pada tahun 2010 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani adalah 4 kasus sedangkan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 6 kasus sehingga Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 66,66%. Pada tahun 2011 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani adalah 17 kasus sedangkan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 25 kasus sehingga Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 68%. Pada tahun 2012 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani adalah 25 kasus sedangkan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 47 kasus sehingga Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 53,19%. Pada tahun 2013 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani adalah 22 kasus sedangkan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 33 kasus sehingga Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) adalah 66,66%

#### 5. Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja pada Urusan Penataan Ruang dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24

#### Capaian Indikator Penataan Ruang di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah rencana tata ruang (dokumen)	0	0	0	3	3
2	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (dokumen)	0	0	0	0	5
3	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	60	65	67,50	70	100
4	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya (buah)	30	30	30	30	30
5	Pengendalian Alih Fungsi Lahan (%)	0	0,013	0,021	0,015	0,018

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang

a. Jumlah Rencana Tata Ruang yang harus Ada.

Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 belum ada dokumen rencana tata ruang yang disusun. Jumlah rencana tata ruang selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) dokumen terdiri dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Kawali dan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Ciamis

b. Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kesesuaian Perizinan Terhadap RTRW mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan Pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan. Dan juga masyarakat semakin mengerti pemanfaatan ruang di wilayahnya sehingga ketika akan memanfaatkan lahan di wilayahnya selalu meminta pertimbangan RTRW/RDTR. Peningkatan juga bisa dikarenakan BPN dan lembaga keuangan seperti Bank selalu mempergunakan RTRW/RDTR ketika akan mengurus masalah peruntukan ruang/sertifikat.

c. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rinciannya (buah)

Penyebarluasan informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi RTR yang telah disusun sehingga segala kegiatan yang berhubungan dengan penataan ruang dapat sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya pada tahun 2009 sampai dengan 2013 sebanyak 30 buah..

d. Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Strategi pengendalian alih fungsi

lahan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Pengendalian alih fungsi lahan tahun 2010 sebesar 0,013% dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 0,021% dan menurun pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 0,015%. Setelah DOB Pangandaran pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Ciamis menjadi 0,018%.

#### 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025), perencanaan jangka menengah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014, Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan dari RPJMD. Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25  
Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ciamis  
Tahun 2009-2013

No	Indikator	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.25 di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009-2013 di kabupaten Ciamis telah memiliki dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan oleh Perda ataupun Perkada, sementara untuk penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sejak tahun 2009 – 2013 telah mencapai 100%.

#### 7. Urusan Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi cukup signifikan, untuk tahun 2013 jumlah kendaraan sepeda motor sebanyak 199.458 buah dan untuk kendaraan mobil roda 4 sebanyak 16.147 buah. Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Umum tiap tahun cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan angkutan umum. Untuk Tahun 2009 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Sebanyak 3.519 sedangkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 4.529 kendaraan, sedangkan Jumlah Uji KIR Kendaraan Angkutan Tidak Umum tiap tahun mengalami fluktuatif dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik Kendaraan untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, dilaksanakan kegiatan cepat tepat murah dan mudah yaitu kegiatan Pengujian kendaraan bermotor keliling dengan cara jemput bola ke daerah-daerah tertentu maupun terminal-terminal. Untuk biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu semula Rp. 25.000,- s.d Rp. 92.500,- menjadi Rp. 45.000,- s.d Rp. 140.000,-. jumlah terminal yang

rusak pada tahun 2009 sebanyak 7 (tujuh) terminal yaitu terminal Cijulang, Banjarsari, Ciamis, Sindangkasih, Panumbangan, Rancah dan terminal Panjalu. Pada tahun 2011 dan 2012 dilakukan rehabilitasi terminal Cijulang, Sindangkasih, Panumbangan, Pamarican, Rancah dan Terminal Ciamis sehingga jumlah terminal yang rusak pada tahun 2013 yaitu terminal Cijulang, Banjarsari dan Terminal Panjalu. Indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26  
Capaian Indikator Perhubungan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah izin dan pembaharuan trayek	810	883	803	826	653
2	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	3.519	3.747	4.052	4.443	3.019
3	Jumlah uji KIR angkutan Tidak Umum (unit)	10.435	10.389	10.258	10.785	6.507
4	Jumlah Terminal Bis dalam kondisi baik (unit)	8	8	14	14	11
5	Jumlah halte (unit)	4	6	8	10	10
6	Lama pengujian kelaikan kendaraan (menit)	30	30	30	22	22
7	Biaya pengujian kelaikan kendaraan (rupiah)	25.000 s/d 92.500	25.000 s/d 92.500	25.000 s/d 92.500	25.000 s/d 92.500	45.000 s/d 140.000
8	Jumlah alat uji yang berfungsi (unit)	1	1	1	1	1
9	Jumlah fasilitas keselamatan lalulintas (unit)	0	83	99	130	140

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis

Ijin trayek di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 pasca ditetapkannya Kabupaten Pangandaran menjadi 689 dari semula sebanyak 830, sedangkan untuk jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 3.019 unit

dan untuk kendaraan tidak umum sebanyak 6.057 unit. Jumlah terminal bis sebanyak 12 buah dimana sebanyak 3 (tiga) unit di lokasi Kabupaten Pangandaran yaitu di Kecamatan Kalipucang, Cijulang dan Pangandaran. Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas sebanyak 140 buah. Untuk lama pengujian kelayakan angkutan umum, biaya pengujian dan pengadaan rambu lalu lintas relatif konstan sekalipun tanpa Kabupaten Pangandaran. Untuk ruas jalan kabupaten yang sudah dilayani angkutan penumpang umum sebanyak 10 ruas jalan, sedangkan ruas jalan yang sudah terpasang fasilitas keselamatan lalu lintas baik pada saat masih bergabung dengan Pangandaran sebanyak 1 ruas jalan.

## 8. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals), terjaganya kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu target pembangunan yang harus dicapai dengan didukung oleh upaya-upaya penanganan permasalahan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan terjaganya kelestarian lingkungan hidup perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun semakin kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor baik perindustrian, pariwisata, kesehatan, pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan/kelautan, infrastruktur, dan lain-lain yang melebihi daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup sehingga meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Capaian indikator pembangunan bidang lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2009 s.d tahun 2013 menunjukkan bahwa :

a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah dari tahun 2009–2013 mengalami kenaikan dan penurunan. Itu dikarenakan adanya penambahan sarana dan prasarana kebersihan dan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang kebersihan sehingga masyarakat sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Tahun 2009 persentase penanganan sampah sebesar 3,3% meningkat pada tahun 2010 menjadi 4% dan menurun kembali pada tahun 2011 sebesar 3,11% dan 2012 sebesar 3,12%, hal tersebut dikarenakan sarana prasarana terutama kendaraan pengangkut sampah mengalami kerusakan dan tidak layak pakai. Namun demikian tahun 2013 mengalami kenaikan lagi menjadi 4,47% setelah adanya peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan terhadap sampah. Setelah DOB Pangandaran, persentase penanganan sampah di Kabupaten Ciamis mencapai 3,92% dengan total volume sampah sebesar 4.435,08 m<sup>3</sup> dan volume sampah yang ditangani/terangkut sebesar 196 m<sup>3</sup>.

b. Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R

Pengelolaan sampah dari sumbernya dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui pengembangan bank sampah/sarana pengolahan sampah 3R diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah sehingga sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi volumenya.

Bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R mulai dikembangkan pada tahun 2013 dengan pembangunan unit 3R di TPA Handapherang, Kecamatan Cijeungjing. Di samping itu melalui pembinaan sekolah berbudaya lingkungan/berwawasan Adiwiyata juga dikembangkan bank sampah sebanyak 10 unit.

c. Persentase Kasus Lingkungan yang Ditindaklanjuti

Penegakan hukum lingkungan dari tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Jumlah laporan/pengaduan kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang diterima Kabupaten Ciamis pada tahun 2013 sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Dari 13 (tiga belas) kasus yang diadukan sebanyak 13 (tiga belas) kasus atau 100% berhasil ditindaklanjuti/ditangani

d. Luas Lahan Kritis

e. Persentase/Rasio RTH yang dimiliki dan Dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan

Persentase RTH yang dimiliki dan Dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2009 – 2011 sebesar 1,15% dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 1,20%. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan lokasi taman/RTH pada tahun 2012 dan terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 1,29%

f. Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka

Pembangunan Taman Hijau dilakukan untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menangkap gas CO<sub>2</sub> yang merupakan salah satu gas rumah kaca (GRK), dan sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Pembuatan taman hijau selain mendorong penurunan emisi GRK, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan koleksi berbagai jenis tanaman lokal yang langka. Dari tahun 2009 s.d 2013 belum dilakukan pembuatan taman hijau.

g. Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan

Program kampung iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan

emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Program kampung iklim di Kabupaten Ciamis baru dimulai tahun 2013, ada sebanyak 2 kampung iklim yang dikembangkan dan dibina yaitu Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing dan Kampung Kuta, Kecamatan Tambaksari. Pada tahun 2013 Kampung Kuta mendapat penghargaan sebagai kampung iklim tingkat nasional.

h. Pelayanan pencegahan pencemaran air

Pelayanan pencegahan pencemaran air merupakan salah satu pelayanan bidang lingkungan hidup untuk mengendalikan pencemaran air dengan cara membatasi jumlah air limbah yang dibuang dari sumber pencemar. Secara administratif, pembatasan air limbah yang dibuang ditetapkan dengan cara menetapkan baku mutu air limbah dari masing-masing jenis pencemar. Selanjutnya pencegahan dilakukan melalui kegiatan pengawasan untuk melihat tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan pengendalian pencemaran air.

SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis mulai diterapkan pada tahun 2010. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2010 sebesar 65,22%, sedangkan pada tahun 2011 ada sedikit penurunan menjadi 64,52%, selanjutnya mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya upaya pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan sehingga pada tahun 2012 mencapai 70% dan pada tahun 2013 mencapai 100%.

i. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara, salah satunya berasal dari kegiatan sumber tidak bergerak dimana sumber yang paling dominan adalah industri.

Industri di Kabupaten Ciamis sebagian besar meliputi industri kecil dan menengah.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara merupakan bagian dari SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada tahun 2010 akan tetapi karena keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana prasarana laboratorium lingkungan sehingga baru direalisasikan pada tahun 2013 sebesar 100%.

- j. Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa  
Kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah pada lahan yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, dan kawasan hutan tanaman (produksi), serta ruang terbuka hijau yang terdapat pada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Dari tahun 2009 s.d 2013 belum ada persentase luasan lahan untuk produksi biomassa yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, padahal merupakan bagian dari SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- k. Jumlah lubang resapan biopori  
Lubang resapan biopori berfungsi untuk meningkatkan laju peresapan air hujan ke dalam tanah, yang secara langsung akan memperluas bidang peresapan air seluas permukaan dinding lubang sehingga meningkatkan cadangan air tanah, mengatasi genangan air/banjir, dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengolah sampah organik menjadi kompos sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Jumlah lubang resapan biopori yang dibangun pada tahun 2009 s.d tahun 2011 sebanyak 1.200 unit, tahun 2012 sebanyak 4.800 unit dan tahun 2013 sebanyak 400 unit sehingga kondisi sampai dengan tahun 2013 terdapat 6.400 unit jumlah lubang resapan biopori sebelum dan setelah DOB Pangandaran.
- l. Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata  
Sekolah berbudaya lingkungan/berwawasan Adiwiyata merupakan sekolah yang didalamnya dilakukan pembinaan guna menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, siswa dan pekerja lainnya), sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung jawab

dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) bukan hanya tampilan fisik sekolah yang hijau/rindang, tetapi wujud sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan yang mengarah kepada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata pada tahun 2009 sebanyak 8 sekolah, meningkat setiap tahunnya 2 (dua) sekolah sampai dengan tahun 2012 sehingga berjumlah 14 sekolah dan pada tahun 2013 sebanyak 4 (empat) sekolah sehingga jumlah seluruh sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan Adiwiyata sampai dengan tahun 2013 sebanyak 18 sekolah.

m. Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi

Air merupakan sumber kehidupan, sehingga keberadaan sumber mata air perlu dijaga kelestariannya melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber mata air agar senantiasa mengalir baik saat musim penghujan maupun musim kemarau guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk air minum, MCK, irigasi, dan lain-lain. Sampai dengan tahun 2013 belum ada kegiatan rehabilitasi sumber mata air.

Tabel 2.27

Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase penanganan sampah (%)	3,30	4	3,11	3,12	3,92
2	Jumlah bank sampah/sarana pengelolaan sampah 3R (unit)	0	0	0	0	10
3	Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
4	Luas Lahan Kritis (Ha)	10.991	10.991	10.991	10.991	10.991
5	Persentase RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah di Wilayah Perkotaan (%)	1,15	1,15	1,15	1,20	1,29
6	Luasan taman hijau/ Koleksi Tumbuhan Lokal yang Langka (Ha)	0	0	0	0	0
7	Jumlah Kampung Iklim yang dikembangkan (kampung)	0	0	0	0	2

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
8	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	0	65,22	64,52	70	100
9	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	0	0	0	0	100
10	Jumlah Informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa (%)	0	0	0	0	0
11	Jumlah lubang resapan biopori (unit)	1200	0	0	4800	6400
12	Jumlah sekolah yang berbudaya lingkungan/berwawasan adiwiyata (sekolah)	8	10	12	14	18
13	Jumlah sumber mata air yang direhabilitasi (buah)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang, BPLH.

## 9. Urusan Pertanahan

Untuk mengukur capaian kinerja diurusan pertanahan dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yaitu penyelesaian izin lokasi, penyelesaian pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Ciamis, Penyelesaian Permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah pemerintah kabupaten Ciamis, penyusunan buku administrasi pertanahan, penyusunan data pertanahan dan fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.28 sebagai berikut:

Tabel 2.28  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	SATUAN
1	Penyelesaian Izin Lokasi	18	12	21	18	3	Izin
2	Penyelesaian pengadaan tanah Pemkab. Ciamis	3	3	3	5	4	Lokasi
3	Penyelesaian Permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkab. Ciamis	24	32	23	24	16	Lokasi
4	Penyusunan buku administrasi pertanahan	40	-	-	-	-	Buku
5	Penyusunan data pertanahan	-	6	-	-	-	Buku
6	Fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan	1	1	2	2	3	Kasus

Berdasarkan tabel 2.28 di atas dapat dilihat bahwa untuk penyelesaian izin lokasi, penyelesaian pengadaan tanah di 36 kecamatan tidak mengalami perubahan pada tahun 2009 dan 2012 dikeluarkan sebanyak 18 izin. Sedangkan untuk penyelesaian pengadaan tanah pemerintah kabupaten Ciamis di 36 kecamatan pada tahun 2009 sebanyak 3 lokasi mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebanyak 45 lokasi, fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan pada tahun 2009 sebanyak 1 kasus, pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 2 kasus. Sedangkan kondisi pada tahun 2013 di 26 kecamatan penyelesaian izin lokasi sebanyak 3 lokasi, penyelesaian pengadaan tanah Pemkab Ciamis sebanyak 4 lokasi, penyelesaian permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkab Ciamis sebanyak 16 lokasi, serta fasilitasi penyelesaian konflik dan permasalahan pertanahan sebanyak 3 kasus.

#### 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan penyusunan database kependudukan yang dimulai dari tahun 2009. Sejak dimulainya program pembuatan KTP SIAK (Kartu Tanda Penduduk berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sampai dengan tahun 2013 database kependudukan telah tersedia melalui online dengan jaringan SIAK yang ada di tiap-tiap kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat bahkan telah terhubung dengan pusat sehingga memudahkan pencatatan mutasi penduduk antar kabupaten/kota Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan mulai Tahun 2007 yang diawali dengan pemutakhiran data kependudukan dan pembuatan database kependudukan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan database, dilaksanakan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data kependudukan yang dilaksanakan Tahun 2010 dan masih dalam tahun yang bersamaan juga diterbitkan Surat Pemberitahuan NIK kepada seluruh penduduk. Kemudian hasil pemutakhiran database tersebut dijadikan dasar dalam penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan mulai Tahun 2011 sampai sekarang. Pelaksanaan penerapan KK/KTP SIAK di Kabupaten Ciamis

dilaksanakan mulai bulan April Tahun 2008, KTP yang masa berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan KK yang semula masa berlaku 3 (tiga) tahun menjadi seumur hidup kecuali ada perubahan biodata penduduk/tambah/kurang anggota keluarga. Pembuatan KTP dan KK SIAK dimulai Tahun 2009 sebagai berikut:

Tabel 2.29  
Rekapitulasi Kepemilikan KTP, KK dan Akte Kelahiran

Uraian	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Kartu Tanda Penduduk	347.292	246.263	204.261	1.060.672	271.544
2. Kartu Keluarga	201.307	135.103	139.063	118.905	124.035
3. Akte Kelahiran	52.900	81.200	68.504	21.860	61.250

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah Kartu Keluarga yang telah diterbitkan selama 5 tahun adalah sebanyak 718.413 buah dan Akte Kelahiran yang telah diterbitkan adalah sebanyak 285.714 buah.

Adapun capaian indikator kependudukan di Kabupaten Ciamis dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30  
Capaian Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	7:10	7:10	9:10	10:10	9,9:10
2	Rasio bayi berakte kelahiran	3,2 : 10	3,4 : 10	5:10	7:10	4,5 :10
3	Kepemilikan KTP (%)	36,4	95,5	94,2	94,5	98,5
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	329	472	394	405	431
5	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2009, baru 70% jumlah penduduk usia di atas 17 tahun atau telah menikah yang memiliki KTP dan pada tahun 2013 hampir seluruhnya memiliki KTP. Hal ini ditunjukkan dengan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk sebesar 7:10 pada tahun 2009 dan sebesar 10:10 pada tahun 2013.

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dari sebesar 0,32 menjadi 0,7, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 0,54.

Persentase kepemilikan KTP dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang ditunjukkan dengan angka 36,4% penduduk telah memiliki KTP dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2009 menjadi 98,5% pada tahun 2013. Hal ini menggambarkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah sebagai warga negara yang baik.

#### 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.31  
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan (%)	10,88	15,70	15,37	15,35	15,08
2	Rasio KDRT (kasus)	15	20	14	11	21
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 10,88, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 15,08, hal ini disebabkan karena sosialisasi gender terus dilakukan sehingga berdampak meningkatnya terhadap pemahaman tentang gender. Untuk rasio KDRT pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 15, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) peningkatan menjadi sebesar 21.

Untuk penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) tetap sebesar 100.

## 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32  
Capaian Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	2,04	2,04	2,04	2,04	3,14
2	Cakupan peserta KB aktif	240.618	244.727	243.100	247.907	178,047
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	192.130	191.985	221.204	226.916	172,349
4	Peserta KB Pria	3.629	3.684	3.817	3.938	2.625
5	Pasangan Usia Subur (PUS)	314.592	315.739	311.139	316.893	231.923
6	% Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	76,49	77,51	78,13	78,23	75,9
7	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	366	352	356	409	324

Sumber: BKBMPD Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, untuk Rata-rata jumlah jiwa per keluarga pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 2,04, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 3,14.

Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 240,618, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 178,047.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 192,130, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 172,349.

Peserta KB pria pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 3.629, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 2.625.

Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 314.592, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 231.923.

Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 76,49, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 75,9.

Untuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 366, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 324.

### 13. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak putus sekolah, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, lansia dan wanita rawan sosial ekonomi. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33  
Capaian Indikator Sosial di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sarana sosial: - Panti Asuhan - Panti Jompo - Panti Sosial	70	70	72	72	58
2	PMKS yang memperoleh bantuan social	95	538	352	14.479	12.373
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	1.084	3.393	15.870	15.892	13.759

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, untuk sarana sosial pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 70, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebesar 58.

Untuk PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 95 orang, sedangkan pada tahun 2013 (26

kecamatan) menjadi sebesar 12.373. terjadinya peningkatan signifikan pada tahun 2011 disebabkan karena adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis

Untuk Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 1084, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menjadi sebesar 13.759 orang.

#### 14. Urusan Ketenagakerjaan

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2013 seperti terlihat dari capaian indikator sebagai berikut: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja.

Pada Periode tahun 2012-2013 mengalami sedikit perubahan yaitu 94,74% di Tahun 2012 dan 94,8% di tahun 2013. Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga kerja yang terdaftar (AK1) yang menunjukkan angka 23,79 % di Tahun 2012 dan 8,31 % di Tahun 2013. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja.

Untuk angka tingkat pengangguran terbuka menurun di periode Tahun 2012-2013. Begitupun juga dengan Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 tidak ada perubahan untuk periode Tahun 2012-2013 sebesar 33,73%. Angka perselisihan pengusaha pekerja di tahun 2012 sebesar 1,61% menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 0%. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2011-2012 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.34  
Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	93,69	94,88	91,56	94,72	94,8
2	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	1,2	51,47	10,70	23,79	8,31
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,94	51,47	10,7	23,79	8,31
4	Keselamatan dan perlindungan/ K3 (%)	29,87	35,97	39,91	33,73	33,73
5	Angka perselisihan pengusaha pekerja (%)	-	-	1,81	1,61	-

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, untuk tingkat partisipasi angkatan kerja (%) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 93,69, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 94,8.

Pencari kerja yang ditempatkan (%) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 1,2, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 8,31, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (%) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 5,94, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 8,31, dan Keselamatan dan perlindungan/K3 (%) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebesar 29,87, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebesar 33,73 sedangkan Angka perselisihan pengusaha pekerja (%) pada tahun 2009 (36 kecamatan) tidak ada, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) juga tidak ada.

#### 15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Ciamis meliputi koperasi dan KUD. Hal ini mengingat posisi dan manfaat koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Ciamis terlihat dari persentase pertumbuhan koperasi yang relatif sama pada tahun 2011 dan 2013 sebesar 44%. Perkembangan jumlah Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kabupaten Ciamis meningkat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Perkembangan perkoperasian dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) di Kabupaten Ciamis dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35  
Capaian Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Mikro di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase koperasi	45	46	44	44	44
2	Jumlah UMKM	22.121	24.055	24.082	24.977	24.977

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan Kab. Ciamis.

## 16. Urusan Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi. Penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari sektor industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Ciamis dari Tahun 2011 sampai tahun 2013 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36  
Capaian Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Unit Usaha					
	PMA	6	6	6	6	6
	PMDN	-	1	1	1	1
	Non PMA/PMDN	4.434	1.947	1.308	1.312	1.055
2	Nilai Investasi PMA (juta Rp.)	10.615	10.615	10.615	10.615	10.615
	PMDN	-	23.100	18.300	48.250	48.250
	Non PMA/PMDN (juta Rp)	104.436	45.952	45.952	48.286	189,343
3	Daya serap Tenaga Kerja					
	PMA	3.073	3.073	3.073	3.073	3.073
	PMDN	-	-	-	-	-
	Non PMA/PMDN	175.300	77.152	77.152	77.746	77.746

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
4	Rasio daya serap tenaga kerja PMA			0,38%	-	-
	PMDN			-	-	-
	Non PMA/PMDN			9,6%	-	-

Ket : -) Data tidak tersedia

## 17. Urusan Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.37  
Capaian Indikator Kebudayaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	SATUAN
1	Jumlah grup kesenian	646	646	646	646	523	Grup
2	Jumlah gedung Kesenian	0	0	0	0	0	Tempat
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	16	16	16	16	16	Kali
4	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	Tempat
5	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	325	325	325	325	331	Situs

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ciamis

Berdasarkan tabel di atas, untuk jumlah grup kesenian pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 646, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi 523.

Untuk Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2009 sampai dengan 2013 tetap sebanyak 16 kali. Untuk Sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2009 sampai dengan 2013 tetap sebanyak 2

tempat. Untuk Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 325 buah, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 331 buah.

#### 18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Upaya pengembangan minat dan bakat pemuda, derajat melalui organisasi kepemudaan dan dengan menumbuhkembangkan budaya olah raga. Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.38  
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah organisasi pemuda	237	237	237	237	175
2	Jumlah organisasi olahraga	94	94	94	94	65
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	158	158	158	158	113
4	Jumlah kegiatan olahraga	307	307	307	307	238
5	Lapangan Olahraga	1358	1358	1358	1358	1016
6	Gedung Olahraga	163	179	185	191	141

Berdasarkan tabel di atas, untuk jumlah organisasi pemuda pada tahun 2009 sampai dengan 2012 tetap sebanyak 237 sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan (26 kecamatan) sebanyak 175, sedangkan untuk jumlah organisasi olahraga pada tahun 2009 sampai dengan 2012 tetap sebanyak 94 organisasi sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi 65 organisasi, Untuk jumlah kegiatan kepemudaan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 tetap sebanyak 158, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 113. Untuk jumlah Lapangan Olahraga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tetap sebanyak 1358 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 1016 lapang. Sedangkan untuk jumlah gedung olah raga dari tahun 2009 sebanyak 163 mengalami peningkatan sampai

dengan tahun 2012 sedangkan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 141 gedung.

#### 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Ciamis terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman keamanan dan ketertiban Pemkab Ciamis juga meningkatkan jalinan hubungan dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres serta meningkatkan koordinasi melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39  
Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)	1	1	1	1	2
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)	3	-	1	-	1

Berdasarkan tabel 2.39 capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yang dilaksanakan pada tahun 2009 – 2012 di 36 kecamatan tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 1 kegiatan sedangkan untuk kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2009 dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dan pada tahun 2011 sebanyak 1 kegiatan. Sedangkan kondisi pada tahun 2013 di 26 kecamatan kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dan kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 1 kegiatan.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran pelaksanaan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sampai dengan tahun 2013 diantaranya dapat dilihat dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja atau Linmas per 10.000 penduduk, rasio pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan, penegakan perda serta cakupan patrol petugas Satpol PP. Perkembangan capaian indikator Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, selengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40

Capaian Indikator Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,38	0,34	0,34	0,30	0,27
2	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	60	56	48	48	48
3	Rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	19	19	37	36	36
4	Penegakan PERDA	3	19	52	66	45
5	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1	1	1	1	1
6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten)	70%	70%	72%	72%	85%
7	Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	9.792	9.792	8.275	8.275	6.248

Sumber : Kesbangpol dan Satpol PP

Berdasarkan tabel 2.40 di atas dapat dilihat bahwa Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk, Petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten mengalami penurunan di 36 kecamatan dimana Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2009 sebesar 0,38 menurun menjadi 0,30 pada tahun 2012 hal ni terjadi karena adanya anggota Satpol PP yang pensiun ataupun alih tugas, Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

pada tahun pada tahun 2009 sebanyak 60 orang juga mengalami penurunan menjadi 48 pada tahun 2012. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten pada tahun 2009 sebanyak 70% mengalami peningkatan menjadi 85% pada tahun 2012. Sedangkan kondisi pada tahun 2013 di 26 kecamatan rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 0,34, Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk sebanyak 46, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten sebesar 85%.

## 21. Urusan Ketahanan Pangan

Upaya yang telah dilakukan dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada peningkatan ketersediaan, pemerataan distribusi dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi danimbang saja, namun juga difokuskan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta secara aktif mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya sebagai berikut : Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ketahanan pangan termasuk urusan wajib. Perkembangan regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41  
Capaian Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Regulasi ketahanan pangan	N/A	N/A	<p>a. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.778-Huk/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis</p> <p>b. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 6 Tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Loka</p> <p>c. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 570.1/Kpts.305-Huk/2010 tentang Penetapan Lokasi Desa Pelaksana Kegiatan dan tenaga Pendamping Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ciamis yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010</p>	Keputusan Bupati Ciamis Nomor 521.1/Kpts.155-Huk/2012 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan dan Tenaga Pendamping Program Peningkatan iversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Ciamis	N/A
2	Ketersediaan pangan utama (ton)			528.720,70	432.016,67	

Sumber: Badan BP4KKP.

## 22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya

tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan Posyandu aktif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42  
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	350	350	353	353	265
2	Jumlah LPM	350	350	350	350	260
3	Posyandu aktif	2.050	2.063	2.072	2.084	1.577

Sumber: BKBMPMD Kabupaten Ciamis

Berdasarkan tabel 2.42 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PKK, LPM, dan posyandu dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan di 36 kecamatan dimana jumlah PKK pada tahun 2009 sebanyak 350 meningkat menjadi 353, jumlah LPM pada tahun 2009-2012 tidak mengalami perubahan sebanyak 350 serta jumlah posyandu aktif pada tahun 2009 sebanyak 2050 dan pada tahun 2012 sebanyak 2.084. Sedangkan kondisi pada tahun 2013 di 26 kecamatan jumlah PKK sebanyak 265, jumlah LPM sebanyak 260 dan posyandu aktif sebanyak 1.577.

### 23. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah

dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik hasil bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik diantaranya buku Ciamis Dalam Angka, buku PDRB Kabupaten Ciamis, buku PDRB per kecamatan, buku PDRB menurut Penggunaan, buku Indeks Harga Konsumen, buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, buku Indeks Kemahalan Konstruksi, buku tabel input dan output, buku IPM, buku Analisis Kemiskinan Kabupaten Ciamis.

#### 24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel 2.43  
Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah SDM pengelola kearsipan daerah (orang)	37	109	127	162	209
2	Pengadaan arsip secara baku (%)	11,03	11,03	12,91	15,02	16,36

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah

#### 25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana Informasi

dan komunikasi seperti Surat Kabar maupun informasi yang dapat diakses melalui website. Sejak Tahun 2009, dapat diakses dengan menggunakan internet melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan alamat [www.ciamiskab.go.id](http://www.ciamiskab.go.id), yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Perkembangan website Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan domain.go.id sampai dengan tahun 2013 mengalami perkembangan yang terdiri dari :

a. Domain

<http://www.ciamiskab.go.id>

b. Sub Domain

- <http://dinasperhubungan.ciamiskab.go.id>
- <http://bppt.ciamiskab.go.id>
- <http://dppkad.ciamiskab.go.id>

Data perkembangan Surat Kabar, Stasiun Radio yang terdaftar dan Website Milik Pemerintah Daerah selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44  
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	20	20	20	20	20
2	Jumlah Stasiun Radio	11	11	11	11	9
3	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	3

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

## 26. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi

pustaka. Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah perpustakaan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 175 unit dan dilengkapi dengan 3 mobil perpustakaan keliling. Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45  
Capaian Indikator Perpustakaan  
di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	25.047	26.079	27.521	27.957	28.223
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	21.141	24.468	26.490	36.637	40.189
	Fiksi (buah)	3.012	5.135	6.584	9.006	9.650
	Non Fiksi (buah)	18.003	19.195	19.755	27.018	29.853
	Majalah (buah)	81	93	96	192	264
	Referensi (buah)	251	319	425	811	957
3	Mobil Perpustakaan Keliling (buah)	1	1	1	3	3
4	Jumlah Perpustakaan (buah)	149	183	211	218	175

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah

Berdasarkan tabel di atas, untuk jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 25.047, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 28.223.

Untuk koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 21.141, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 40.189.

Untuk Mobil Perpustakaan Keliling (buah) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 1, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 3.

Untuk jumlah Perpustakaan (buah) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 149, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 175.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan transmigrasi. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

#### 1. Urusan Pertanian

Produktivitas padi dan bahan pangan utama meningkat dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Perkembangan indikator pertanian selama dua tahun terakhir dapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46  
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan  
Kontribusi terhadap PDRB di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

NO	POTENSI	TAHUN					SATUAN
		2009	2010	2011	2012	2013	
A	Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura						
1	Produksi Padi	721.915	783.524	772.325	688.891	525.665	ton
2	Produksi Jagung	49.098	47.845	51.876	51876	28.250	ton
3	Produksi Kacang Tanah	5.142	4.081	2.977	3.872	2.641	ton
4	Produksi Kacang Kedelai	7.042	2.298	5.674	3.362	1.390	ton
5	Produksi Kacang Hijau	1.229	117	922	864	416	ton
6	Produksi Ubi Kayu	106.050	80.786	83.979	111.242	79.164	ton
7	Produksi Ubi Jalar	8.427	7.886	9.403	9946	5.841	ton
B	Komoditi Perkebunan						
1	Produksi Kelapa	42.748,16	42.952,25	37.516,16	37.890,22	18.775,18	ton
2	Produksi Kako	2.032,80	340,9	620,19	638,24	445,72	ton
3	Produksi Cengkeh	532,63	533,75	114,25	114,25	56,84	ton
4	Produksi The	660,01	448,84	331,89	331,89	335,21	ton
5	Produksi Kopi	1.401,01	1.419,97	944,62	951,93	639,13	ton

NO	POTENSI	TAHUN					SATUAN
		2009	2010	2011	2012	2013	
C	Komoditi Peternakan						
1	Produksi Daging Ternak						
	Sapi	1.811.216	1.823.785	1,830,623	1,913,011	1.076.719	kg
	Kerbau	143.887	145.179	110,629	108,413	79.198	kg
	Domba	538.836	540.733	549,367	585,075	379.742	kg
	Kambing	359.130	379.432	422,096	422,542	284.767	kg
2	Produksi Daging Unggas						kg
	Ayam Buras	2.805.039	2.868.373	2,910,557	2,912,012	1.298.435	kg
	Ayam Ras Pedaging	56.228.074	66.427.158	67.634.317	67.639.199	67.131.386	kg
	Itik	166.311	171.155	173,501	179,833	91.878	kg
3	Produksi Telur						
	- Ayam Buras	1.602.886	1.385.376	1.300.383	1.241.507	860.234	kg
	- Ayam Ras Petelur	5.396.526	5.405.950	5,866,534	6,364,864	4.678.539	kg
	- Itik	1.402.290	1.341.904	1.341.240	1.419.184	959.099	kg
4	Produksi Susu	924.036	1.373.669	814.408	394.926	51.552	liter
5	Jumlah ternak yang masuk Kab. Ciamis						
	- Sapi	13.370	11.970	8,017	9,216	4.565	ekor
	- Kerbau	377	406	299	97	849	ekor
	- Domba	7.159	6.861	13,346	11,040	4.153	ekor
	- Kambing	6.272	5.902	6,990	4,734	3.121	ekor
6	Jumlah ternak yang keluar Kab. Ciamis						
	- Sapi	9.423	9.623	8.017	6,050	7.611	ekor
	- Kerbau	123	133	1,885	217	1.011	ekor
	- Domba	27.794	27.848	33,867	22,164	40.245	ekor
	- Kambing	17.004	17.130	30,732	39,306	14.426	ekor
7	Jumlah unggas yang keluar Kab. Ciamis						
	- Ayam Buras	621.824	666.877	716,874	728,813	58.244	ekor
	- Ayam Ras	69.173.860	76.049.075	76,049,871	76,059,825	72.515.517	ekor
	- Itik	127.144	131.031	140,875	140,924	177.159	ekor
D	Kontribusi terhadap PDRB						
1	Kontribusi sektor pertanian	30,50	30,52	29,93	28,82	27,13	%
2	Kontribusi sektor perkebunan	2,61	2,51	2,43	2,36	2,15	%

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Ciamis

## 2. Urusan Kehutanan

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Ciamis sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk optimalisasi fungsi kawasan lindung, hutan produksi dan hutan rakyat. Selain hal tersebut pembangunan sektor

kehutanan bertujuan meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Untuk memperbaiki dan menanggulangi kerusakan hutan dan lahan dilakukan beberapa upaya yaitu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47  
Capaian Indikator Kehutanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	2,675	1,754	2.170	2.100	1.510
2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) AHB	0,47%	0,45%	0,43%	0,44%	0,41%

### 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara umum sektor pertambangan di Kabupaten Ciamis menunjukkan perkembangan yang positif. Potensi sumber daya mineral antara lain mangan, batu gamping, fosfat, tanah liat, kwarsa, sirtu, kaolin. Potensi tersebut tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cihaurbeuti, Rancah, Cijeungjing, Pamarican, Banjarsari, Lakbok.

Capaian kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dalam kurun waktu Tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dikarena beberapa hal, antara lain tidak beroperasinya lagi perusahaan tambang karena bahan baku yang sudah habis dan belum adanya investor yang baru serta naiknya sektor-sektor yang lain. Selain itu terbatasnya data mengenai potensi sumber daya mineral sehingga belum terukurnya potensi sumber daya bahan galian mengakibatkan kurangnya investor di sektor pertambangan.

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Rasio elektrifikasi desa telah

mencapai 100%, akan tetapi data rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 sebesar 60% terjadi peningkatan di tahun 2013 yaitu sebesar 69,42%. Selama kurun waktu lima tahun hanya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis sebesar 9,42 %, hal ini berarti harus ada upaya lebih optimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan (IR/SR), Pembangunan Instalasi Biogas dan Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Rendah (TR). Selain itu pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan.

Kemudian setelah pemisahan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis, Rasio elektrifikasi di Kabupaten Ciamis pada akhir tahun 2013 mencapai 69,42 %, sehingga berdasarkan data s/d tahun 2013 dengan terpisahnya DOB Kabupaten Pangandaran maka ada sekitar 30.58% dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Ciamis yang belum menggunakan listrik. Dengan demikian maka diperlukan upaya fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan pemasangan jaringan listrik baru pada rumah tangga yang sampai saat ini belum memasang jaringan listrik sehingga ratio elektrifikasi listrik di Kabupaten Ciamis bisa mencapai 100 %.

Indikator urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.48  
Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Ciamis  
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Instalasi bio gas (unit)	0	17	0	0	10
2	Jumlah Instalasi biomassa (unit)	0	0	0	0	0
3	Jumlah PJU Tenaga Surya (unit)	0	0	0	0	0
4	Jumlah sumur bor (unit)	0	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
5	Proporsi Pertambangan dan Pengambilan air tanah yang sudah memiliki ijin (%)	0	37	0	0	30
6	Tersedianya Peta Daerah Rawan Gerakan tanah (Kecamatan)	7	8	9	11	13
7	Persentase Rumah tangga pengguna listrik (elektrifikasi) (%)	60	63	63	65	69,42
8	Bantuan listrik keluarga Pra Ks	350	350	350	350	418
9	Panjang saluran listrik perdesaan Tegangan Rendah (TR) (KMS)	0	2,85	0,8	0	14,4
10	Penerangan jalan umum (titik)	40	53	83	526	2.889

Pada tahun 2010 Luas Pertambangan keseluruhan adalah sebesar 4.685,50 Ha dan Luas pertambangan yang berizin adalah seluas 4.672,23 Ha sehingga prosentase luas pertambangan yang berizin adalah sebesar 99,71 %.

Tabel 2.49

Data Pertambangan di Kabupaten Ciamis Data terakhir tahun 2010

1.	Luas pertambangan keseluruhan (plus DOB)	4.685,50 Ha
2.	Luas pertambangan di luar DOB	224,17 Ha
3.	Luas pertambangan liar keseluruhan (plus DOB)	13,27 Ha
4.	Luas pertambangan berizin keseluruhan (plus DOB)	4.672,23 Ha
5.	Luas pertambangan liar diluar DOB	3,57 Ha
6.	Luas pertambangan berizin diluar DOB	220,60 Ha

#### 4. Urusan Pariwisata

Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.945.587 orang meningkat dari tahun 2012 sebanyak 1.584.422 orang. Apabila dilihat dari kontribusi sektor terhadap PDRB, sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013

sebesar 6,77%. Perkembangan jumlah wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 2.50  
Capaian Indikator Pariwisata di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kunjungan wisatawan (orang)	1.114.000	1.232.313	1.386.145	1.584.422	1.510.589
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB HB (%)	5,80	5,99	6,35	6,77	7,75

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Ciamis

## 5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama dua tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51  
Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Produksi perikanan (ton)	16.016,40	23.168,98	24.702,91	29.432,69	29.432,73
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	14,73	15,19	15,98	16,92	19,61
3	Cakupan bina kelompok Nelayan (KUB)	25	76	105	114	114
4	Budi Daya Air Tawar (KAT) (Ha)	2.636,78	2.636,78	2.636,78	2.636,78	2.064,72
5	Air Payau (Tambak) (Ha)	29,99	75,50	75,50	75,50	-
6	Sawah (Ha)	115,64	115,64	115,64	115,64	99,44
7	Kolam Air Deras (unit)	131	131	131	131	129
8	Kolam Jaring Apung (unit)	72	72	72	72	5
9	Produksi Ikan Laut (ton)	1.231,88	441,77	759,23	759,23	-
10	Nilai Produksi Laut (rupiah)	19.125.676.043	7.415.710,65	11.875.451,701	43.031.101,965	-
11	Produksi Ikan Tambak (ton)	79,05	721,44	715,50	687,80	-
12	Produksi Ikan Kolam (ton)	13.666,17	20.836,43	21.476,05	24.853,46	24.275,71
13	Produksi Ikan Sawah (ton)	289,10	319,92	352,12	252,76	35,30
14	Produksi Ikan Jaring Apung (ton)	43,50	73,14	321,41	389,40	27,03
15	Produksi Ikan Kolam Air Deras (ton)	421,60	446,82	765,82	725,29	579,66

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

## 6. Urusan Perdagangan

Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 20,65% meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 20,56%. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Ciamis selama tahun 2012 sebesar US\$ 190,226 Milyar meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya sebesar US\$ 128,298 Milyar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.52  
Capaian Indikator Perdagangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	20,48	20,69	20,56	20,65	19,46
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$) Rumus : Ekspor- Impor *	137,036	24,297	128,298	190,226	272,059
3	Cakupan bina usaha informal (PKL)	15	15	20	25	25

Ket \*:Menggunakan asumsi dari neraca perdagangan Prov-Jabar dimana Kabupaten Ciamis % ekspor sebesar 0,01% dari total ekspor Jawa Barat

## 7. Urusan Perindustrian

Pada tahun 2012, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 6,99% meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 6,78%. Pada Tahun 2012 jumlah industri di Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan sebesar 0,14% menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2011 yang sebesar 0,21%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga mengalami kenaikan pada tahun 2013 terdapat 22.471 buah dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 22.051 buah. Jumlah pengrajin yang dibina selama tahun 2013 sebanyak 15 pengrajin. Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.53  
Capaian Indikator Perindustrian di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	6,72	6,71	6,78	6,99	6,81
2	Pertumbuhan Industri (%)	0,1	0,06	0,21	0,14	0,27
3	Jumlah industri kecil & rumah tangga (buah)	21,919	21,945	22.021	22.051	22.471
4	Cakupan bina pengrajin kelompok	10	10	12	16	15

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan.

## 8. Urusan Ketrasmigrasian

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pada Tahun 2013 terdapat warga yang mengikuti program transmigrasi swakarsa sebanyak 17 kepala keluarga.

Tabel 2.54  
Capaian Indikator Ketrasmigrasin di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	SATUAN
1	Transmigrasi yang difasilitasi Pemkab (KK)	38/149	25/86	24/100	20/75	17/68	KK/Jiwa
2	Pelatihan calon transmigran	35	25	25	20	20	KK

Berdasarkan tabel diatas, untuk transmigrasi yang difasilitasi Pemkab (KK) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 38/149, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) menurun menjadi sebanyak 17/68.

Untuk Pelatihan calon transmigran pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 35, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) tetap sebanyak 20.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani.

Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut:

#### 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT perkapita)

Hasil analisis konsumsi Rumah Tangga perkapita dapat disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2.55  
Angka Konsumsi Rumah Tangga perkapita  
Tahun 2009 s.d 2013 di Kabupaten Ciamis

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Total Pengeluaran Rumah Tangga	9.220.000.000.	9.260.000.000	6.850.000.000
2	Jumlah penduduk	1.560.021	1.562.886	1.155.500
3	Rasio (1./2.)	492.534	493.759	494.032

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

## 2. Nilai Tukar Petani

Untuk hasil penghitungan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.56  
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Ciamis

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013
1.	Indeks yang Diterima Petani (It)	129,47	150,88	162,53	113,23
2.	Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	130,67	139,48	145,70	108,84
3.	NTP	99,28	108,17	111,55	104,04

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator Sarana Perekonomian, Jaringan Listrik dan Penataan Wilayah. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

#### 1. Sarana Perekonomian

Jumlah Restoran di Kabupaten Ciamis terdapat peningkatan, pada tahun 2011 terdapat 131 buah dan meningkat pada tahun 2012 sebanyak 146 buah. Sedangkan untuk hotel di Kabupaten Ciamis tidak terdapat peningkatan yang signifikan di tahun 2011 dan 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57  
Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Jumlah Restoran (buah)	5	6	8
2	Jumlah Hotel (buah)	77	85	88
	- Hotel Berbintang	1	1	1
	- Hotel Non Berbintang	76	84	86

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## 2. Jaringan Listrik

Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Rasio elektrifikasi desa telah mencapai 100%, akan tetapi data rasio elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 sebesar 58% terjadi penurunan di tahun 2011 yaitu sebesar 60%. Hal ini berarti harus ada upaya lebih optimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.

## 3. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

Tabel 2.58

Kemantapan Jalan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kemantapan jalan (%)	37,14	29,02	30,58	34,80	44,24

Data: Dinas Bina SDA, Energi dan SDM

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. Setelah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran, maka panjang jalan kabupaten Ciamis menjadi sepanjang 478,11 km, dengan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 211,55 km, sehingga proporsi panjang jalan dalam kondisi baiknya sebesar 44,25 %.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis selama 5 tahun terakhir peningkatan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif kecil bahkan terkesan relatif datar atau jalan ditempat. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun pertama atau tahun 2009 telah terjadi bencana alam gempa bumi yang mempengaruhi terhadap daya dukung atau kestabilan tanah dasar jaringan jalan yang proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada waktu itu sudah mencapai

37,14 % sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 29,02 % atau mengalami turun sebesar 8,12 % mengingat anggaran pada tahun 2010 lebih diprioritaskan pada upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor perumahan dan sektor lainnya yang rusak akibat bencana alam gempa bumi sedangkan untuk penanganan jalan hanya bersifat penanganan darurat ( holding ) saja. Penanganan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam gempa bumi baru bisa dilakukan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sehingga proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik selama 3 tahun terakhir kembali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 mencapai 30,58 %, tahun 2012 mencapai 34,8 % dan pada tahun 2013 mencapai 39,88 %. Namun jika melihat perkembangan yang ada maka kemampuan APBD Kabupaten Ciamis dalam 1 tahun hanya bisa meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik rata-rata sebesar 3 % sehingga untuk mencapai proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Ciamis sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kondisi jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah min 60 % atau tersisa sebesar 22 % dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun kedepan untuk pencapaian SPM tersebut.

#### 4. Penataan Ruang

Tabel 2.59

Kesesuaian Perijinan Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Ciamis  
Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kesesuaian Perizinan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	60	65	67,50	70	100

Data : Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Kesesuaian Perizinan Terhadap RTRW mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan

Pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan. Dan juga masyarakat semakin mengerti pemanfaatan ruang di wilayahnya sehingga ketika akan memanfaatkan lahan di wilayahnya selalu meminta pertimbangan RTRW/RDTR. Peningkatan juga bisa dikarenakan BPN dan lembaga keuangan seperti Bank selalu mempergunakan RTRW/RDTR ketika akan mengurus masalah peruntukan ruang/sertifikat.

## 5. Perumahan

Tabel 2.60

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun					
		2009	2010	2011	2012	2013	2013 ex DOB
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan (%)	0	0	0	0	30,07	33,51
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan (%)	0,613	2,72	4,49	6,65	8,29	10,78

Data : Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang

Untuk Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan pada tahun 2013 adalah sebesar 30,07% dimana Jumlah Penduduk terlayani Pada Tahun 2013 adalah 133.460 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan adalah 443.831 jiwa. Ketika Kabupaten Ciamis Berpisah dengan DOB Pangandaran maka Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perkotaan adalah 33,51% dimana Jumlah Penduduk terlayani Pada Tahun 2013 setelah berpisah dengan DOB Pangandaran adalah 118.507 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan adalah 353.612 jiwa.

Untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sistem penyediaan air bersih ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeliharaan pada sistem penyediaan air bersih yang sudah terbangun, dengan pola partisipatif masyarakat.

- 2) Melakukan fasilitasi optimalisasi kelembagaan dalam pengelolaan sistem penyediaan air bersih.
- 3) Melakukan upaya-upaya untuk melestarikan ketersediaan air baku, misalnya dengan pembuatan sumur-sumur resapan, pembuatan biopori, optimalisasi penampungan air (embung, broncaptering).

Dengan demikian diharapkan pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal untuk air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan bisa terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari bisa tercapai.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Itu dikarenakan meningkatnya jumlah desa penerima bantuan pembangunan air bersih sehingga meningkat pula jumlah jiwa yang menikmati air bersih. Sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan Pada Tahun 2009 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 9.843 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2009 adalah 1.605.414 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 0,613%. Sampai Tahun 2010 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 46.818 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2010 adalah 1.720.280 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 2,72%. Sampai Tahun 2011 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 79.706 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2011 adalah 1.774.032 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 4,49%. Sampai Tahun 2012 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 118.909 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2012 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 6,65%. Sampai Tahun 2013 Jumlah Pengguna Air Bersih adalah 148.319 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.789.121 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 8,29%. Sampai Tahun 2013 Jumlah Pengguna Air Bersih setelah berpisah dengan DOB Pangandaran

adalah 145.084 jiwa sedangkan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2013 adalah 1.346.133 jiwa sehingga Persentase/Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Perdesaan adalah 10,78%.

#### 6. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Ciamis disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.61

Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2009 – 2011 Kabupaten Ciamis

NO	Uraian	2009	2010	2011
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	165.513,72	102.362,06	102.362,06
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	167.362,72	140.563,06	140.563,06
3.	Rasio (1./2.) (Ha)	98,90	72,8	72,8

Sumber : Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang

Ket : Perhitungan berdasarkan seluruh luasan kawasan budidaya (140.563,06 Ha atau 57,49%) tanpa memasukan luas kawasan untuk pemukiman dan tegalan (23.001,00 Ha atau 9,41%)

#### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas dan angka demo. Angka kriminalitas disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.62

Angka Kriminalitas Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013

No	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah kasus Narkoba	25	25	67	36	29
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	5	5	9	1	1
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	0	56	0	1	4
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	40	40	22	19	19
5.	Jumlah kasus Pencurian	263	263	229	330	224
6.	Jumlah kasus Penipuan	49	49	33	n/a	n/a
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	10	10	5	3	1
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	726	448	365	390	278
9.	Jumlah Penduduk	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.789.696	1.372.846
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9) (%)	0,05	0,026	0,021	0,021	0,02

Sumber : Polres Ciamis

Angka demo di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2013 relatif tidak terlalu banyak dan tidak mengganggu ketertiban umum, antara lain terkait masalah masalah pertanahan, pelayanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur.

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3. Rasio ketergantungan di Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63  
Rasio Ketergantungan Tahun 2009 - 2013 di Kabupaten Ciamis

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	392.800	399.157	419.013	412.693	418.050
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	127.420	143.189	145.053	145.344	139.507
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	520.222	542.276	564.066	557.997	557.557
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.137.416	1.167.966	1.210.123	1.231.124	1.267.335
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,46	0,46	0,47	0,45	0,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.64  
Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2009 - 2013 Kabupaten Ciamis

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah lulusan S1	8.049	9.267	9.370	10.474	9.874
2.	Jumlah lulusan S2	402	524	530	583	518

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
3.	Jumlah lulusan S3	3	3	4	8	0
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	8.454	9.794	9.904	11.065	10.392
5.	Jumlah penduduk	1.606.778	1.605.414	1.720.280	1.774.032	1.372.846
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,52	0,61	0,58	0,62	0,75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ciamis.

Berdasarkan tabel diatas, untuk Jumlah lulusan S1 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 8.049, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 9.874. Sedangkan untuk Jumlah lulusan S2 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 402, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 518. Sementara Jumlah lulusan S3 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 3, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) tidak ada.

Untuk Jumlah lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 8.454, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 11.065. Sedangkan untuk Jumlah penduduk pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 1.606.778, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 1.774.032. Sementara untuk Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) pada tahun 2009 (36 kecamatan) sebanyak 0,52, sedangkan pada tahun 2013 (26 kecamatan) meningkat menjadi sebanyak 0,75.